

PROSIDING

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU



DISEMINASI DATA DEMAND-SUPPLY PERUMAHAN DAN ADVOKASI PERUMAHAN-KAWASAN PERMUKIMAN DI KOTA AMBON

14 Juni 2023

EDISI 2023

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga seluruh kegiatan dan tugas-tugas yang diamanatkan kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Direktorat Jenderal Perumahan dapat terselesaikan dengan baik dan Prosiding kegiatan **Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan-Kawasan Permukiman di Kota Ambon** dapat diterbitkan.

Kegiatan ini dilakukan untuk sebagai tindak lanjut Amanah Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta untuk mendorong percepatan dan efektifitas pendataan Program Sejuta Rumah (PSR) dalam hal ini keberadaan Pokja PKP sebagai wadah yang berfungsi mengkoordinasikan, mensinkronisasikan arah kebijakan dan strategi program daerah lintas sektor terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di daerah Kota Ambon yang optimal.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi baik dari Dinas PKP Kota Ambon , Bappeda Kota Ambon , Ketua Pokja Kota Ambon, seluruh peserta tamu undangan, Tenaga Ahli (Perencanaan,Kelembagaan dan Pendataan), TIM BP2P Maluku serta para panitia kegiatan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah saling membantu dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan “ **Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan-Kawasan Permukiman di Kota Ambon Tahun 2023** ”.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan Maluku

PITHER PAKABU, S.T., M.Si
NIP. 19691218 1996603 1 005

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
1.2.1. Maksud	3
1.2.2. Tujuan	4
1.2.3. Waktu Penyelenggaraan	4
1.2.4. Peserta.....	4

BAB II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN PENYELENGGARAN DISEMINASI-ADVOKASI.....5

2.1. Pembukaan dan Arahan	5
2.2. Optimalisasi Kinerja Pokja PKP dan Kolaborasi Sinergitas Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Melalui Forum PKP Kota Ambon.	5
2.2.1. Hasil Review Kinerja Pokja PKP Kota Ambon.....	7
2.2.2. Isu Permasalahan PKP Kota Ambon	9
2.3. Profil Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kota Ambon	9
2.4. Capaian Program Sejuta Rumah (PSR) dan Perbaikan RTLH di Kota Ambon.....	10
2.5. Point Hasil Sharing-Diskusi.....	15
2.6. Saran-Saran	16

2.7. Point Kesepakatan Bersama.....	16
BAB III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	17
3.1. Kesimpulan.....	17
3.2. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	17
LAMPIRAN A (SURAT UNDANGAN DAN JADWAL ACARA)	
LAMPIRAN B (ABSENSI PESERTA)	
LAMPIRAN C (DOKUMENTASI KEGIATAN)	
LAMPIRAN D (BAHAN TAYANG NARASUMBER)	

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perumahan dan kawasan permukiman dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, memberi konsekuensi adanya keharusan pada setiap tingkatan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman (PKP). Pemerintah pusat maupun daerah perlu menyelenggarakan PKP karena dapat mendukung penataan dan pengembangan wilayah, menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sistem, dan budaya, dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau. Pemerintah dalam penyelenggaraan PKP berorientasi pada pemenuhan akses masyarakat terhadap layanan bidang PKP, yang tercermin pada aktivitas perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Pemerintah menentukan target capaian yang akan dipenuhi di wilayah kerjanya, dan dalam hal ini pemerintah menyusun strategi pemenuhan dengan melibatkan berbagai para pemangku kepentingan yang ada. Pemerintah juga menyusun sejumlah kebijakan dan aturan untuk memayungi atau menjadi panduan dalam implementasi program/kegiatan yang telah disusun dan juga untuk mendorong optimalisasi peran dari para pelaku pembangunan ikut terlibat dalam pembangunan bidang PKP (pemerintah sebagai enabler). Pemerintah juga menjadi provider dalam pemenuhan akses layanan bidang PKP tetapi melihat bahwa anggaran pemerintah terbatas, maka peran pemerintah sebagai fasilitator/enabler sangat penting agar pihak non-pemerintah dapat berperan aktif memberi kontribusi nyata dalam penyediaan layanan bidang PKP bagi masyarakat. Pemerintah pun melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kuantitas dan kualitas layanan yang dihasilkan.

Perumahan dan kawasan permukiman (PKP) sebagai urusan pemerintahan konkuren dan termasuk urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan yang sangat kompleks dan bersifat multi sistem. Penanganan urusan PKP tidak bisa ditangani secara sendiri, oleh karenanya harus dilakukan secara komprehensif, sinergis, dan kolaboratif dari pusat hingga daerah. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 54 mengamanatkan adanya upaya mengkoordinasikan pengembangan PKP berupa kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP) pada setiap tingkatan pemerintahan. Keberadaan Pokja PKP diharapkan dapat meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi berbagai sistem pada pengembangan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan terkait PKP sehingga penyelenggaraan PKP menjadi lebih efektif dan efisien.

Urgensi Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang dilaksanakan dengan berbagai fungsi strategis, yaitu diantaranya sebagai pusat pembentukan karakter bagi keluarga, pelestarian budaya, serta peningkatan kualitas pada generasi yang akan datang. Selain itu, pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman dapat meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat yang dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak. Pada implementasinya, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia mengalami berbagai tantangan, diantaranya meliputi rumah tidak layak huni, permukiman kumuh, backlog, dan tantangan perumahan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman tersebut, pemerintah menetapkan target pembangunan yang termuat pada rencana jangka panjang dan menengah nasional yang didapatkan berdasarkan data demand masyarakat terhadap perumahan, data supply perumahan, serta data lainnya yang menunjang terwujudnya jumlah target pembangunan pada suatu wilayah. Sehingga untuk mendapatkan target perumahan dan terpenuhinya jumlah perumahan yang baik, maka dibutuhkan kegiatan pendataan yang komprehensif terkait perumahan dan kawasan permukiman pada masing-masing wilayah yang ada khususnya di Provinsi Maluku.

Pada penerapannya, kegiatan pendataan yang dilakukan ini mengalami berbagai kendala seperti terbatasnya informasi yang didapatkan, serta sulitnya mendapatkan data yang bersumber dari Kabupaten/Kota. Untuk memudahkan terpenuhinya data tersebut, pemerintah melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) melakukan pendataan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai langkah untuk mengkolaborasi, mensinkronkan, dan mengkoordinasikan program serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman pada masing-masing provinsi. Pendataan terkait perumahan dan permukiman pada lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat dilaksanakan oleh Tim Ahli Perencanaan dan Pendataan (TAPP) Provinsi Maluku dengan melibatkan berbagai dinas serta perangkat daerah yang kemudian dikoordinasikan melalui Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP).

Mengingat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 131 bahwa pelibatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan PKP berupa pemberian masukan, disampaikan melalui Forum PKP dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 54 dan Pasal 84 yang mengindikasikan perlunya ada Forum PKP dalam mendukung penyelenggaraan PKP, dengan demikian pembentukan Forum PKP menjadi hal yang tak terelakkan untuk mewujudkan penyelenggaraan PKP yang efektif dan efisien. Amanah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 dengan hadirnya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Perumahan dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan di daerah agar

penyelenggaraan perumahan lebih tepat guna dan tepat sasaran. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Maluku pada Tahun 2023 mempunyai beberapa fokus utama, yaitu: 1) Peningkatan kemandirian Pokja PKP di daerah; dan 2) Pembinaan Pengelolaan data dan sistem informasi bidang PKP, 3) Pendampingan terkait dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Peningkatan kemandirian Pokja PKP dititik beratkan pada pembentukan/restrukturisasi Pokja PKP dan pembentukan Forum PKP berikut program kerjanya sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman , serta pemantauan dan mendorong penerapan SPM bidang perumahan melalui Pokja PKP Provinsi dan Pokja PKP Kabupaten/ Kota. Terkait Pengelolaan data dan sistem informasi bidang PKP dititikberatkan pada mendorong kemandirian Dinas PKP provinsi dan Dinas PKP kabupaten/kota dalam pengumpulan dan pengelolaan data PKP, pengumpulan data koordinat kegiatan Ditjen Perumahan dalam rangka mendukung kegiatan Kebijakan Satu Peta , pengorganisasian dan pendokumentasian data perumahan ke dalam Sistem Informasi Bantuan Penyediaan Perumahan (SIBARU), Kolaborasi data dan informasi sistem terkait PKP dan melakukan konsolidasi data PKP. Kemudian terkait pendampingan RP3KP dititikberatkan pada pendampingan penyusunan-review/pengecekan kualitas dokumen RP3KP sedang atau sudah disusun – pendampingan penyusunan Ranperkada/Ranperda (RP3KP) serta sosialisasi RP3KP hingga monitoring status RP3KP Prov/Kab/Kota.

Melihat urgensi tersebut dan sebagai tahap lanjutan dalam pelaksanaan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman agar maksimal dan tepat guna , maka Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku perlu melakukan kegiatan di kab/kota yang ada di Provinsi Maluku dengan pembahasan yaitu terkait “ **Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan-Kawasan Permukiman di Kota Ambon Tahun 2023** ”.

1.2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan-Kawasan Permukiman di Kota Ambon Tahun 2023 diselenggarakan dengan maksud dan tujuan dapat dijelaskan pada sub bab berikut :

1.2.1. Maksud

Adapun maksud dari kegiatan Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan-Kawasan Permukiman di Kota Ambon Tahun 2023 dimaksudkan sebagai upaya tindak lanjut Amanah Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta untuk mendorong percepatan dan efektifitas pendataan Program Sejuta Rumah (PSR) dalam hal ini keberadaan Pokja PKP sebagai wadah yang berfungsi mengkoordinasikan, mensinkronisasikan arah kebijakan dan strategi program daerah lintas sektor terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di daerah Kota Ambon yang optimal.

1.2.2. Tujuan

Tujuan dari Kegiatan Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan-Kawasan Permukiman di Kota Ambon Tahun 2023 ini adalah:

1. Mendorong kapasitas kelembagaan di Kota Ambon.
2. Memberikan pendampingan pembentukan forum PKP.
3. Identifikasi Data Demand-Supply Perumahan dalam Pemenuhan Basis Data dan Pencapaian Target Program Sejuta Rumah (PSR).
4. Mendorong peningkatan (SPM) Standart Pelayanan Minimal Bidang Perumahan.
5. Mendorong pendayagunaan dalam memaksimalkan RP3KP sebagai dokumen perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan efisien.
6. Dapat membantu koordinasi dan memperlancar tugas dari Tenaga Ahli (Pendataan, Kelembagaan dan Perencanaan) dari Dinas PKP Kota Ambon , Pokja PKP Kota Ambon dan seluruh perangkat OPD pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku.

1.2.3. Waktu Penyelenggaraan

Kegiatan Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan Kawasan Permukiman di Kota Ambon Tahun 2023 dilakukan secara offline yang tempat penyelenggaraannya dengan rincian sebagai berikut:

- Hari Tanggal : Rabu, 14 Juni 2023
- Pukul : 08:30 WIT – Selesai
- Tempat : Ruang rapat Darwin Balai Walikota Ambon

1.2.4. Peserta

Peserta yang hadir dalam Kegiatan Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan-Kawasan Permukiman di Kota Ambon Tahun 2023 terdiri dari : DPKP Kota Ambon dan Para Staff, Bank BRI, Baznas Kota Ambon, Dinas Sosial Kota Ambon, Dinas Kesehatan, PDAM Kota Ambon, DLHP Kota Ambon, Perkim Kota Ambon, Dinas P3AMD, BPS Kota Ambon, BPBD Kota Ambon, PLN, Bank BTN dan TIM BP2P Maluku.

BAB II.

POKOK – POKOK PEMBAHASAN PENYELENGGARAN DISEMINASI-ADVOKASI

2.1. Pembukaan dan Arahan

Kegiatan Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan Kawasan Permukiman di Kota Ambon Tahun 2023 diawali dengan sambutan dan arahan dari Bpk. Muhammad Abdullah, S.T selaku Kasie Pelaksana Wilayah I . Adapun point arahan yang disampaikan terkait dengan menjelaskan tujuan agenda Diseminasi-Advokasi ialah mendorong kapasitas kelembagaan di Kota Ambon, membantu memberikan pendampingan pembentukan forum PKP, identifikasi Data Demand-Supply Perumahan dalam Pemenuhan Basis Data dan Pencapaian Target Program Sejuta Rumah (PSR), mendorong peningkatan (SPM) Standart Pelayanan Minimal Bidang Perumahan, mendorong pendayagunaan dalam memaksimalkan RP3KP sebagai dokumen perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan efisien serta dapat berpartisipasi aktif dalam membantu koordinasi data dll antara Balai P2P dan Kota Ambon dapat berjalan dengan lancar.

2.2. Optimalisasi Kinerja Pokja PKP dan Kolaborasi Sinergitas Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Melalui Forum PKP Kota Ambon.

Materi ini disampaikan oleh TA.Perencanaan dan Kelembagaan Prov.Maluku (Ahmad Latupono, S.P). Didalam materi ini membahas beberapa hal terkait dengan pedoman dasar hukum ialah :

- UU No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan sesuai perubahannya UU No. 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- PP No.14 Tahun 2016 Tentang PKP
- Permen PUPR No.12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan PKP
- SE Dirjen Perumahan No. 06/SE/Dr/2022 Tentang Juknis Tata Cara Penyelenggaraan RP3KP

Pokja PKP adalah kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman yang adalah lembaga untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan serta mengintegrasikan urusan pengembangan PKP pada tingkatan masing-masing sedangkan Forum PKP adalah wadah untuk memperemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP di daerah. Urgensi Pokja dan Forum Pokja perlu dioptimalkan dikarenakan urusan PKP sangat kompleks/multisector, terdapat *gap* dari pelaku kepentingan, koordinasi dan sinkronisasi antar sektor nampak stagnan apabila pokja/forum tidak optimal, pengawasan dan

pengendalian yang lemah, sejumlah dokumen pembangunan di daerah sangat minim dan beringan dengan kualitasnya yang rendah.

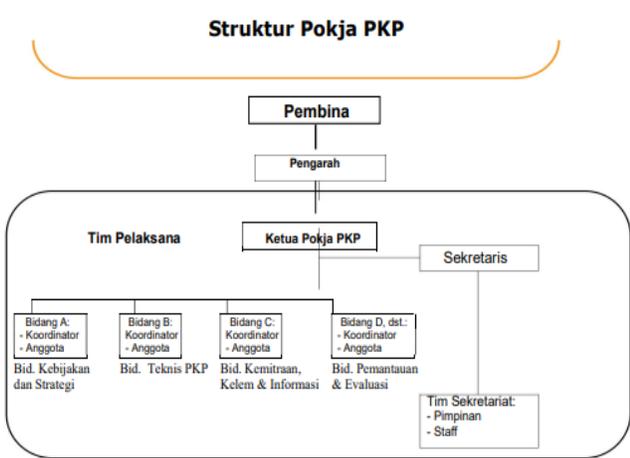
Keberfungsian Pokja PKP agar optimalkan perlu didasarkan atas 5 indikator penilaian yakni : aktivitas monitoring, rencana kerja Pokja, sekretariat PKP, aktivitas rapat rutin, dukungan BOP. Evaluasi Kinerja dan Keberfungsian ini berfungsi apabila ke 5 indikator tersebut dapat terlaksana, namun salah satu saja indikator tidak terlaksana/Sebagian tidak terlaksana maka otomatis dapat dikatakan Pokja PKP tersebut tidak berfungsi, hal tersebut dikarenakan ke 5 indikator tersebut saling memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya

INDIKATOR KEBERFUNGSIAN POKJA PKP

- 5 indikator :
1. Memiliki Program/Rencana Kerja
 2. Memiliki Sekretariat Pokja PKP
 3. Dukungan BOP
 4. Aktivitas Rapat Rutin
 5. Aktivitas Monitoring Rutin

BERFUNGSI	KURANG BERFUNGSI	TIDAK BERFUNGSI
Pokja akan dinyatakan berfungsi apabila telah memenuhi 5 indikator tersebut.	Pokja akan dinyatakan kurang berfungsi apabila hanya memenuhi antara 3 – 4 indikator tersebut.	Pokja akan dinyatakan tidak berfungsi apabila hanya memenuhi 2 indikator tersebut.

Lebih lanjut disampaikan juga pula terkait struktur Pokja PKP dan Struktur Pembentukan Forum Pokja PKP yang perlu diperhatikan ialah sebagai berikut :



Struktur Keanggotaan Pokja PKP Kabupaten/Kota

Pembina	: Bupati/ Walikota
Tim Pengarah	
Ketua	: Pejabat Eselon II Sekretariat Daerah
Wakil Ketua	: Pejabat Eselon II Bappeda
Anggota	: Pejabat Eselon II OPD terkait; (DPKP, DPU)
Tim Pelaksana	
Ketua	: Pejabat Eselon III Bappeda yang membidangi urusan infrastruktur dan pengembangan wilayah
Sekretaris	: Pejabat Eselon III OPD yang membidangi urusan PKP
Anggota	: Pejabat Eselon III OPD terkait : <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan b. Perumahan dan Kawasan Pemukiman c. Pertanahan d. Lingkungan Hidup
Bidang - Bidang	: <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan dan Strategi b. Teknis PKP c. Sanitasi dan Air Minum d. Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi e. Pemantauan dan Evaluasi

Struktur Dan Pembentukan Forum PKP

Forum PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas unsur:

- a. Instansi pemerintah yang terkait dengan bidang PKP;
- b. Asosiasi perusahaan penyelenggara PKP;
- c. Lembaga jasa keuangan (Perbankan);
- d. Asosiasi profesi penyelenggara PKP;
- e. Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara PKP;
- f. Pakar di bidang PKP;
- g. Akademisis; dan/atau
- h. Lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan PKP

Struktur organisasi Forum PKP paling sedikit terdiri atas:

- a. **Ketua;**
- b. **Sekretaris; dan**
- c. **Anggota.**

2.2.1. Hasil Review Kinerja Pokja PKP Kota Ambon

Keberadaan Pokja Kota Ambon secara garis besar terkait kelembagaannya baru terbentuk sejak Tahun 2020 dan kinerja Pokja Kota Ambon juga hampir sama dengan kinerja pokja yang lain sangat memperhatikan, dikarenakan dari awalnya terbentuk sampai 2022 dari sisi keaktifan dan kegiatan yang dilakukan juga tidak terlalu intens hal tersebut juga dikarenakan program kerja juga tidak difollow-up serta pertemuan rutin pun tidak pernah. Dan sepanjang Tahun 2022 hanya baru saja memulai dari sisi komunikasi dan sinkronisasi program. Melihat hal tersebut untuk Tahun 2023 ini Pokja PKP Kota Ambon perlu dioptimalkan segera untuk koordinasi, sinkronisasi antar sektor , giatkan penyelesaian penyusunan RP3KP, segera bentuk Forum Pokja PKP dan perlu turut aktif dalam mendayakan gunakan Pokja PKP dan Forum PKP dalam mendukung pendataan baseline data perumahan yang up to date.

Keberadaan dokumen perencanaan RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) merupakan hal penting karena sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dalam melaksanakan proses pembangunan untuk mengatasi masalah sektor perumahan dan kawasan permukiman dalam jangka waktu 20 Tahun kedepan yang lebih baik, terarah dan tepat sasaran . Dalam menyusun tujuan RP3KP ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

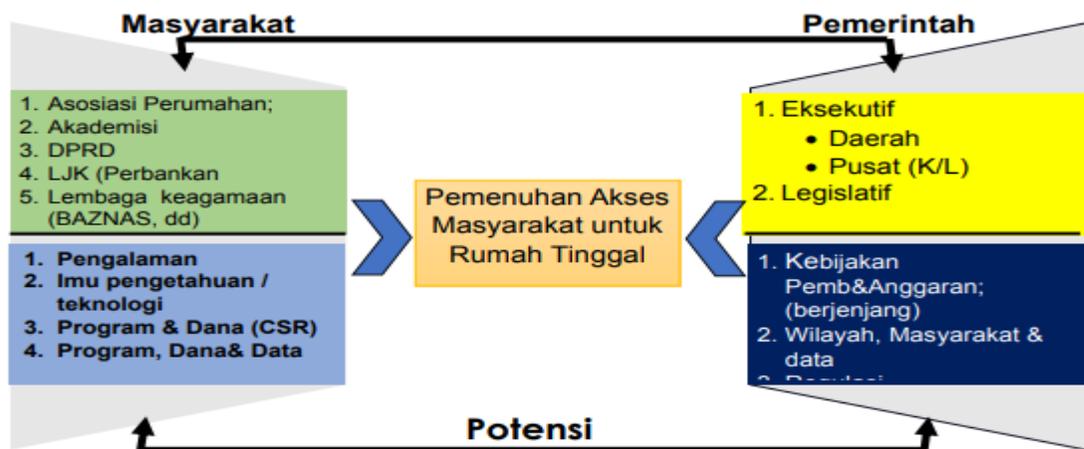
- Disusun berdasarkan isu strategis dan keinginan cita-cita PKP 20 Tahun kedepan
- Bersifat spesifik menggambarkan permasalahan potensi, peluang tantangan PKP dan mencirikan khasan daerah

- Kalimat tujuan disusun dalam satu rangkaian kalimat yang jelas
- Dapat memberi arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RP3KP

Disampaikan juga untuk kab/kota yang telah memiliki RP3KP perlu terus melaporkan status RP3KP sudah sampai ditahap mana. dan nantinya juga Balai P2P Maluku atas dasar tupoksi dari Dirjen Perumahan kedepannya akan melakukan penilaian terhadap RP3KP yang telah dimiliki pada masing-masing kab/kota. Dalam hal ini tata cara pelaporannya :

- Dilakukan oleh Balai/TA dengan berkoordinasi dengan Dinas PKP PKP Prov/Kab/Kota
- Pelaporan menggunakan formast yang sudah disediakan oleh Dit.SSP secara online
- Pelaporan dilakukan dua kali dalam setahun yaitu minggu pertama bulan juni dan desember
- Pelaporan wajib menyertakan dokumen RP3KP (progress terakhir dokumen saat update status)

Disampaikan pula mekanisme membangun kolaborasi dan kiat sinergi titik temu pemerintah dan masyarakat dapat dilihat pada bagan berikut :





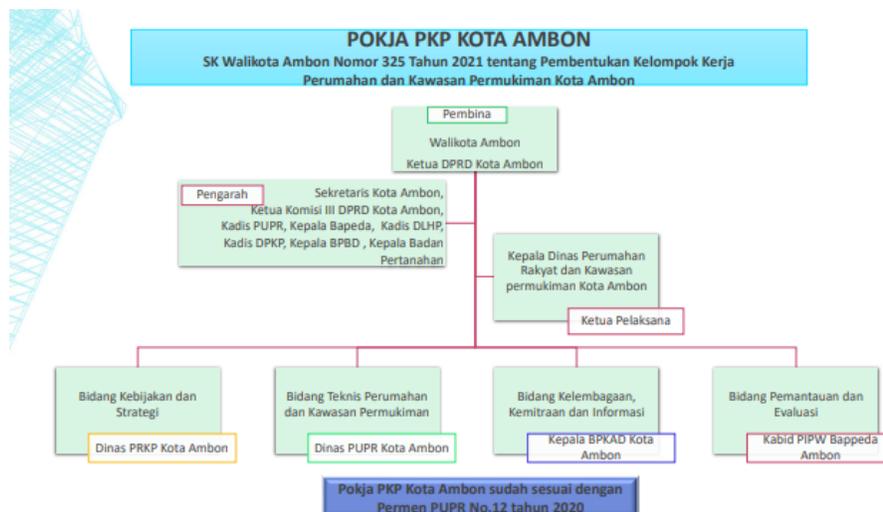
2.2.2. Isu Permasalahan PKP Kota Ambon

Isu dan permasalahan Pokja PKP Kota Ambon ialah permasalahan mengenai isu lahan terbatas namun banyak lahan yang legalitasnya belum jelas kepemilikannya, sumber pembiayaannya yang terbatas dan isu lingkungan yang marak seperti sampah dlll

2.3. Profil Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kota Ambon

Materi ini disampaikan oleh staff Pokja PKP Kota Ambon. Didalam materi ini disampaikan beberapa hal terkait dengan :

1. Pokja PKP Kota Ambon secara structural sudah sesuai dengan Permen PUPR No.12 Tahun 2020



2. Kinerja Pokja PKP Kota Ambon (KOTAKU) mendapat penilaian 50 (kategori sedang). Dan untuk rencana kerja Pokja PKP Kota Ambon terfokus untuk penyusunan dokumen perencanaan serta kolaborasi penanganan kumuh dengan TIM Kotaku-Ambon.
3. Status keberfungsian Pokja PKP Kota Ambon dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



2.4. Capaian Program Sejuta Rumah (PSR) dan Perbaikan RTLH di Kota Ambon

Materi ini disampaikan oleh TA.Pendataan Prov.Maluku (Tila Yespensa Saya,S.P.W.K) Namun diwakilkan penyampaian nya dari TIM BP2P Maluku. Didalam materi ini disampaikan peran diseminasi-advokasi terkait pendataan yakni :

- Koordinasi dan menjamin ketersediaan data terkait perumahan yang valid dan akurat sesuai dengan format basis data perumahan
- Memberikan pendampingan kepada pokja dalam pengumpulan data perumahan
- Mewujudkan kolaborasi dalam pendataan perumahan provinsi dan kab/kota
- Membangun dan mengelola Satu Data Indonesia bidang perumahan

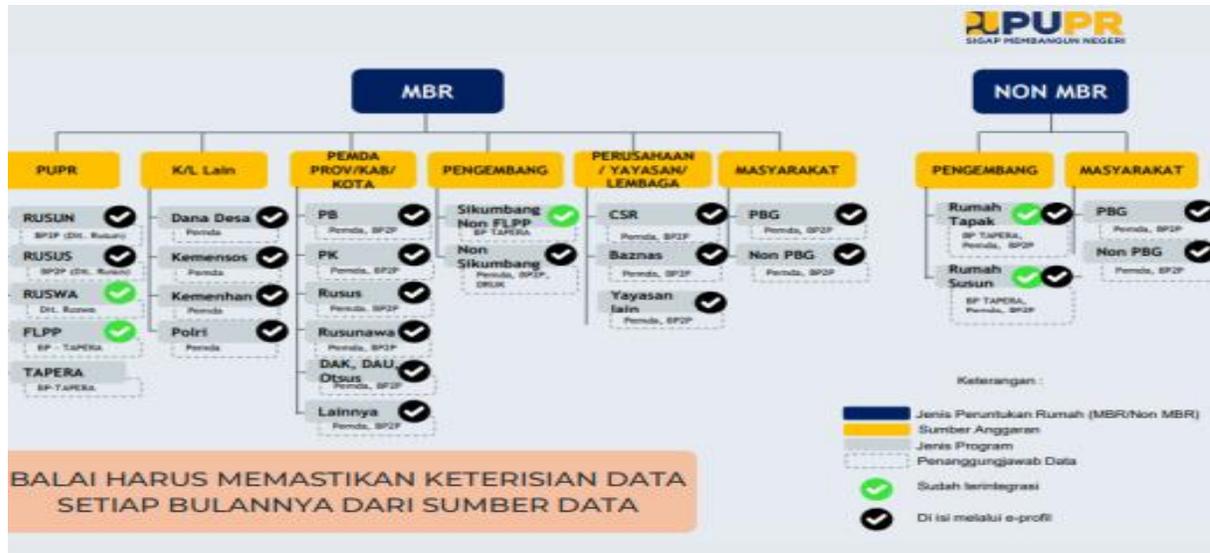
Lebih lanjut disampaikan beberapa pembahasan ialah sebagai berikut :

Urgensi Penyediaan Perumahan yang layak sebagai amanat (UUD Pasal 28 H ayat 1, UU No.1/2011, UU No.39/1999 dan Perpres 3/2016), tercapainya SDGS tujuan 11.1, mampu menyerap banyak tenaga kerja, berdampak multiplier efek untuk sektor lainnya dan dapat berperan penghapusan kemiskinan ekstrim serta penurunan stunting di daerah.

Urgensi Program Sejuta Rumah (PSR) merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan para pemangku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian bagi seluruh masyarakat serta terkhususnya bagi masyarakat penghasilan rendah (MBR) dalam menjangkau kepemilikan rumah yang layak huni serta agar mampu menekan penurunan angka backlog dan RTLH didaerah maupun penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan hal ini juga dalam memastikan penargetan 1 Juta rumah setiap tahunnya dan dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun dasar hukum pendataan PSR menjadi tanggung jawab bukan hanya di pusat tapi juga di tingkat daerah:



Pelaksanaan PSR tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa adanya basis data terpadu dalam menjamin kualitas data dalam mengambil keputusan yang tepat guna sehingga perlu adanya dukungan pendataan rill time/up to date dari seluruh stakeholder di lingkup pemerintahan pusat dan provinsi/kab/kota dan dukungan kolaborasi pelaksanaan realisasi dengan kolaborasi pendanaan. Dalam hal ini terkait dengan data, apabila data yang tersedia berkualitas akan membuat keputusan yang diambil pembuat kebijakan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran. Sebaliknya, informasi yang tidak akurat kemungkinan besar akan membuat kebijakan yang diambil pun menjadi keliru. Adapun struktur data Program Sejuta Rumah (PSR) yang perlu diperhatikan untuk dikoordinasi datanya dan pelaksanaannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



(Struktur Data Program Sejuta Rumah)

Disampaikan juga terkait dengan Target PSR Nasional sebesar 1.176.830 unit dan Target Provinsi Maluku 6.036 yang perlu tercapai di Tahun 2023 ini dan hal tersebut juga perlu menjadi dukungan pelaksanaannya di Kota Ambon. Lebih jelas dilihat pada gambar dibawah ini :



Disampaikan juga terkait mekanisme penyampaian data PSR yang nantinya Balai P2P akan berkoordinasi namun juga menjadi perhatian bersama PKP Kota Ambon untuk dapat berperan aktif dalam menginput data update realisasi PSR setiap bulannya melalui SIBARU (PSR) adapun penjelasannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

DAFTAR ISIAN PEMBAIAN PERUBAHAN PERUMAHAN 2022

Kegiatan pembaruan Perumahan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi Perumahan. Data ini merupakan bagian dari Pembangunan Data Data Perumahan Provinsi sesuai UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pasal 17 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 10 ayat 1.

Tabel ini dan data Perumahan dari Kawasan Perumahan (PKP) Kabupaten, sebagai kelengkapan antara lain berkoordinasi dengan Pokja P2P Kabupaten, BPS Kabupaten, Dinas Sosial Kabupaten, BPSK Kabupaten, dan pemerintah yang berkaitan lainnya secara berkala untuk pelayanan lebih lanjut dapat menghubungi Koordinator Bidang Pengembangan Data dan Sistem Informasi, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan ES@PUPR.go.id

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Bobot Perolehan Basis Data Perumahan

Kategori	Kode	Bobot
A	Data Kolektibilitas P2P	Bobot 10%
B	Data Status Pokja Forum Perumahan	Bobot 10%
C	Data Status RP2P	Bobot 10%
D	Data Demand/Kebutuhan Perumahan tahun 2022	Bobot 20%
E	Data Supply/Data Pembangunan Perumahan tahun 2022	Bobot 20%
F	Data Target Perumahan tahun 2023-2025	Bobot 20%
Verifikasi	Formula Penentuan lain Pendataan P2P	Bobot 10%

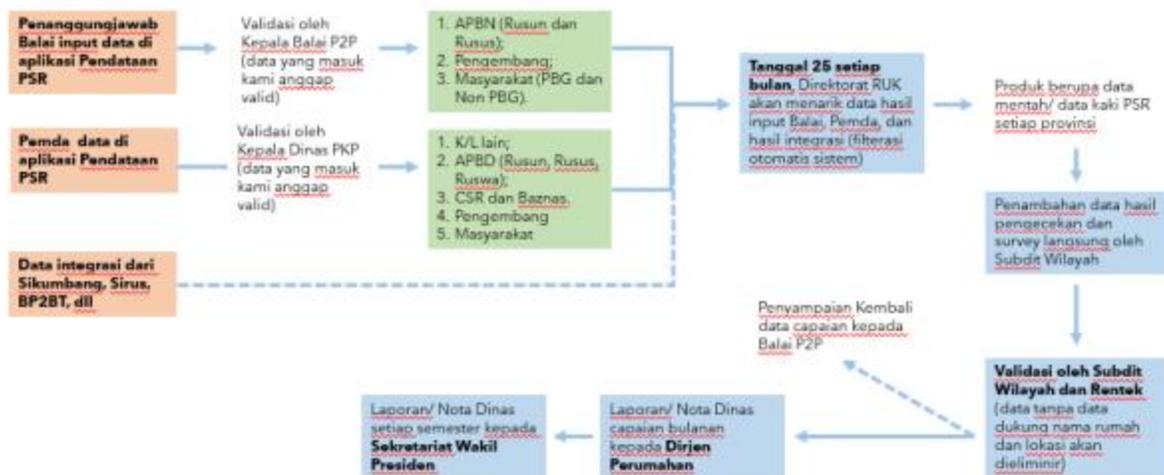
Bulan	Waktu Perolehan	Jenis Kebutuhan	Program	Provinsi	Kelurahan/Kota	Kemampuan	Kategori Data	Realisasi Pembangunan 2022 (Unit)	Tipe/Spesifikasi	Sumber Data	Bentuk Data
1 Januari	Dia kirimkan, jember, antar 02/01/2022	Dua MEPR, Satu MEPR	Dua Rusun/Rusunwa, Rusunwa APBN, Rusunwa AP/RS, R/L, dan AP/RS, CSR/Bantuan Pengembang Masyarakat	Dua Provinsi	Dua Kabupaten/Kota	Dua Kecamatan	Dua Kelurahan/Desa	Dua	Pembangunan Lantai Perumahan (Unit Kelengkapan di dalam bangunan (jangan pembangunan di dalam bangunan, tidak termasuk atau tidak termasuk))	Dua Rumah Tapak/ Rumah Datar	Dua Sumber, Jml Data, Bsk, Areal, LAPP, Survey lapangan, dll
1 Februari											

MEKANISME PENYAMPAIAN/PENGISIAN FORM

- 01 PENGISIAN DATA UPDATE DARI DPKP DENGAN KOORDINASI DATA PENDUKUNG DENGAN SUMBER DATA LAINNYA
- 02 TA. PENDATAAN KOORDINASI INTENS DENGAN NARAHUBUNG DAN KOMUNIKASIKAN KENDALA YANG DITEMUI DALAM PENYELESAIAN PENYAMPAIAN DATA
- 03 PROSESI PEMBAGIAN KEMBALI FORM-UPDATE BATAS MAX PALING LAMBAT SETIAP TGL 17 PER BULAN BERJALAN
- 04 EVALUASI DAN FIKSASI DATA FINAL SEBELUM INPUT (BATAS SETIAP TGL 20 BULAN BERJALAN)
- 05 INPUT OTOMATIS KE PUSAT MELALUI SIBARU MAUPUN SECARA MANUAL DAN VERIFIKASI FIX (TGL 21-23 TANGGUNG JAWAB INPUT BP2P DAN PEMDA)

UPDATE PER BULAN TANPA PENGECUALIAN

ALUR MEKANISME PENDATAAN PROGRAM SEJUTA RUMAH



Input data secara bulanan dan input data penambahan di bulan berjalan. Misal: realisasi bulan Januari 50 unit, tambahan realisasi di bulan Februari 25 unit. Maka input di bulan Februari = 25 unit BUKAN 75 unit (50+25 unit)

Rekapan Bulanan Realisasi secara berkala tiap bulan : Dirjen Perumahan > Menteri PUPR > Setwapres

BP2P

1. Meningkatkan/cepat pendataan PSR pada BP2P berkewajiban untuk mengisi realisasi pembangunan RUSUN dan RUSUS di wilayahnya secara berkala setiap bulan.
2. Memastikan Pemda di wilayahnya mengisi data PSR secara online dan berkala setiap bulan.
3. Melakukan tabulasi data pengembang Non ukumbang dan data Non PBG dari data primer dan sekunder berdasarkan template excel dan Direktorat RUK.
4. Apabila pengisian data PSR belum optimal, agar BP2P secara aktif membantu pengisian melalui akun pemda secara berkala tiap bulannya.
5. Tiap BP2P perlu mendorong pendataan PSR dan memastikan ketercapaian target pendataan PSR per Provinsi di Wilayahnya.
6. Data PSR yang diinput online pada aplikasi pendataan PSR perlu dilengkapi dengan upload bukti validasi/persetujuan Kepala BP2P.

Pemda (Pemprov / Kabupaten & Kota)

1. Pemda perlu berpartisipasi aktif untuk mengisi realisasi pembangunan rumah di Wilayahnya pada aplikasi pendataan PSR secara berkala setiap bulan, sesuai struktur data PSR.
2. Data PSR yang diinput online pada aplikasi pendataan PSR perlu dilengkapi dengan upload bukti validasi/persetujuan Kepala Dinas yang menangani PKP di daerah.

Terkait dengan kelengkapan penyampaian data baseline masih terdapat data yang belum lengkap sedangkan untuk progress pelaksanaan PSR di Kota Ambon tetap harus ditingkatkan karena kondisi kekumuhan di Kota Ambon masih 130 Ha (Sumber: Data Baseline Kotaku-BPPW Kota Ambon) dan juga kondisi Demand yang tinggi (25.000 unit) tidak sebanding dengan supply yang baru hanya berjalan 157 unit sehingga perlu komitmen bersama giatkan lagi realisasi dengan dukungan Pemda dan OPD yang ada di Kota Ambon.

KONDISI DATA SUPPLY

KAB/KOTA	MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR
	BSPS (PUPR)	PEMDA		YAYASAN/LEMBAGA/CSR		PENGEMBANG		PERBANKAN		PTSP (IMB/PBG)		MASYARAKAT (NON PBG)		DANA DESA
Ambon	61	-	-	-	-	8	36	10	12	7	22	-	-	1

TOTAL SUPPLY : 157 UNIT

KONDISI PROGRESS PERLU DITINGKATKAN LAGI UNTUK 7 BULAN TERSEISA TAHUN 2023 (PERLU KOMITMEN BERSAMA)



Dan juga perlu perhatian khusus dan tingkatkan progress lagi serta pendayagunaan potensi kolaborasi pendanaan yang variative dalam antisipasi/penyelesaian permasalahan anggaran yang bergeser sehingga pelaksanaan PKP dapat lebih optimal di beberapa bulan tersisa di Tahun anggaran 2023.

Dalam hal ini, Peran Pokja PKP dan Forum PKP dalam pendatan Perumahan Kota Ambon perlu digiatkan keberfungsiaannya dalam memastikan data PKP terupdate dengan membangun system management pendataan yang rill time, membantu membantu/memberikan umpan balik terhadap setiap dinamika data PKP, rutin diseminasi informasi atas data resmi dan informasi PKP, optimalisasi kolaborasi berbagai stakeholder untuk pendanaan PKP serta optimalkan pemanfaatan fasilitas seluruh potensi pembiayaan

eksisting pemerintah pusat maupun daerah (DAK Integrasi, APBD, Dana Desa dll). Yang menjadi catatan juga bukan hanya terkait pendataan tapi juga perlu dukungan pelaksanaannya dari keseriusan pemda/OPD dan stakeholder di Kota Ambon untuk menggiatkan penyelenggaraan perumahan di Kota Ambon.

2.5. Point Hasil Sharing-Diskusi

- **Disampaikan Ketua Baznas Kota Ambon:** Tahun 2022 kolaborasi dengan baznas nasional membangun 15 unit rumah. Terkendala di sertifikat tanah (membutuhkan biaya pengurusan Rp5 juta), akhirnya yang bisa dibantu hanya 9 rumah. Tahun depan rencana membangun 100 rumah untuk Provinsi Maluku.
Jawab: Terima kasih pada baznas yang telah berkontribusi pada pembangunan perumahan di kota Ambon. Diperlukan forum pkp untuk membahas hal ini dengan BPN. Ini menjadi catatan kami agar tidak terjadi lagi, karena kita rugi tidak bisa dibangun 6 rumah MBR dan juga terkait legalitas sebenarnya PUPR bantuan BSPS untuk legalitas dapat digantikan dengan surat.
- **Disampaikan Staff Dinas Sosial Kota Ambon:** Dinas sosial tidak dapat menangani perumahan karena sudah dilimpahkan ke dinas PKP. Peran dinas sosial sekarang hanya memberikan data. Pengalaman pernah memberikan bantuan, tapi terkendala legalitas tanah
Jawab: ini kasus kedua sehingga ditekankan lagi butuhnya koordinasi antar pemda dalam menyediakan perumahan di Kota Ambon dengan koordinasi dinas lainnya agar hal serupa tidak terjadi lagi.
- **Disampaikan Dinas P3AMD Kota Ambon:** Setuju harus diadakan forum PKP, disarankan agar melibatkan desa negeri dalam koordinasi dengan BPN terkait tanah. karena desa negeri lebih tahu terkait permasalahan tanah di desa.
Jawab: Setuju melibatkan desa negeri karena lahan di ambon ini sering terjadi perselisihan sehingga harus didiskusikan dengan detail dengan BPN dan desa negeri.
- **Disampaikan Staff DPKP Kota Ambon :** Terkait data PSR akan kami tingkatkan koordinasi lagi dan berkomitmen untuk tingkatkan progress lagi.

2.6. Saran-Saran

1. **Disampaikan TA. Perencanaan dan Kelembagaan** (diupayakan kinerja Pokja PKP dan Forum PKP Kota Ambon perlu dioptimalkan lagi di masa Tahun 2023 ini terkait dengan keberfungsian untuk koordinasi, sinkronisasi antar sektor , giatkan penyelesaian penyusunan RP3KP , perlu turut aktif dalam mendayakan gunakan Pokja PKP dan Forum PKP dalam mendukung pendataan baseline data perumahan yang up to date serta tingkatkan lagi progress realisasi).
2. **Disampaikan Staff BPS Kota Ambon** (untuk badan pusat statistik sebenarnya ada survey juga yang terkait perumahan dan kondisi kemiskinan, hal ini kedepannya setelah datanya diolah ke Bappenas dan TNP2K data tersebut juga bisa digunakan dalam membantu baseline penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Ambon lebih baik lagi.

2.7. Point Kesepakatan Bersama

- Dapat mensegerakan penyelesaian penyusunan RP3KP.
- Pokja PKP dapat meningkatkan keaktifannya dan keberfungsian dalam Pelaksanaan kinerjanya.
- Dapat mensegerakan pembentukan Forum Pokja PKP Kota Ambon.
- Dapat menggiatkan kolaborasi pendanaan yang lebih variatif dalam pelaksanaan penyelenggaraan perumahan di Kota Ambon.
- Dapat berpartisipasi aktif dalam koordinasi pendataan PSR, inputing data PSR di SIBARU dan turut mendukung pelaksanaan pencapaian target Program Sejuta Rumah (PSR) Provinsi Maluku.

BAB III.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kegiatan Diseminasi Data *Demand-Supply* Perumahan dan Advokasi Perumahan-Kawasan Permukiman di Kota Ambon Tahun 2023, dapat disimpulkan yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Pokja PKP Kota Ambon belum bekerja secara optimal hingga periode juni 2023 ini, hal tersebut terlihat dari keberfungsian untuk koordinasi, sinkronisasi antar sektor dll.
2. Peran kolaborasi antar sektor dan lintas OPD masih belum optimal.
3. Terkait status RP3KP perlu disegerakan dalam penyelesaian penyusunannya agar acuan dalam PKP dapat lebih jelas dan terarah.
4. Dalam hal penguatan data dan system informasi PKP pada baseline perumahan untuk Kota Ambon masih terdapat beberapa data yang masih kurang dan perlu dilengkapi lagi sedangkan terkait pelaksanaan PSR di Kota Ambon perlu tetap terus bersama-sama giatkan pelaksanaan realisasi penyelenggaraan perumahan dengan menggandeng pendanaan BUMN/TNI-POLRI/DANA DESA/Kementrian lainnya dll di sisa beberapa bulan target pencapaian Tahun 2023 bukan hanya bergantung pada APBD dan Pendanaan Pusat.

3.2. Rekomendasi Tindak Lanjut

Dengan adanya Kegiatan Diseminasi Data *Demand-Supply* Perumahan dan Advokasi Perumahan-Kawasan Permukiman di Kota Ambon Tahun 2023, maka rekomendasi tindak lanjut diantaranya sebagai berikut :

- Giat optimalisasi peningkatan kinerja dan keaktifannya serta mensegerakan penyelesaian penyusunan RP3KP Kota Ambon.
- Giat kegiatan pokja dapat melakukan kolaborasi dengan pihak swasta, pengembang, pemdes, kementerian lainnya ataupun CSR dll dalam hal penganggaran agar supaya tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah yang notabnya sangat terbatas.
- Pokja PKP dan Forum PKP dapat berpartisipasi aktif dalam sharing dan mengupdate data base perumahan secara real-time serta melengkapi baseline perumahan yang belum lengkap.
- Pelaksanaan PSR dapat terealisasi dengan baik di Kota Ambon dan permasalahan *backlog* perumahan dan RTLH dapat teratasi di Tahun 2023. Serta Admin PKP Kota Ambon dapat turut aktif melakukan inputing data realisasi pelaksanaan PSR di Aplikasi Sibaru

LAMPIRAN A

(Surat Undangan dan Jadwal Acara)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

Jl. Akula Raya Blok 6 No. 19 Perum Wayame Permai, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon | email: bp2pmaluku@pu.go.id

Ambon, 8 Juni 2023

Nomor : UM.01.02-Rb17/310
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Undangan Diseminasi Data Demand dan Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon

Kepada Yth :
(daftar terlampir)
Di,-

Tempat

Dalam rangka pencapaian target RPJMN 2020-2024 di bidang perumahan, Pemda bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku yang diharapkan mampu menggali potensi yang ada melalui kolaborasi sektor untuk mendorong pengarusutamaan Pokja PKP yang ada baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 mempunyai 3 (tiga) fokus utama, yaitu: 1) Peningkatan kemandirian Pokja PKP di daerah; 2) Pengelolaan data dan sistem informasi bidang PKP; 3) Pendampingan penyusunan dan penyelenggaraan perencanaan bidang PKP khusus bagi daerah terpilih. Ketiga substansi tersebut perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan secara intensif dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku dapat mencapai target dan hasil yang diharapkan sebagai upaya melaksanakan Amanah Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta dalam rangka mendorong percepatan dan efektifitas pendataan Program Sejuta Rumah (PSR) di Provinsi Maluku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami informasikan rencana Diseminasi Data Demand dan Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Juni 2023
Waktu : 08.30 s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon

Agenda Advokasi:

- Pendampingan Pembentukan Forum PKP dan Penguatan kapasitas kelembagaan
- Identifikasi Data Demand dan Supply Perumahan
- Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
- Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Balai

PITHER PAKABU, S.T., M.Si

Nip: 19691218 199603 1005

Tembusan Kepada Yth:

- Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan
- Direktur Rumah Umum dan Komersial
- Kepala Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan.

Lampiran 1 : Surat Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku
 Nomor : UM.01.02-Rb17/310
 Perihal : Undangan Diseminasi Data Demand dan Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon

Dasar diseminasi dan advokasi;

1. Undang-Undang No. 1 tahun 2011 pasal 131, peran masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP dilakukan dengan membentuk Forum PKP;
2. UU No. 23 tentang Pemerintahan Daerah, bidang perumahan urusan wajib pelayanan dasar yang sangat kompleks dan bersifat multi sektor. Penanganannya tidak bisa ditangani secara sektoral, oleh karenanya harus dilakukan secara komprehensif, sinergis, dan kolaboratif dari pusat hingga daerah.
3. PP No 14 tahun 2016 tentang PKP pasal 54, mengamanatkan adanya lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan PKP berupa Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) pada setiap tingkatan pemerintahan;
4. Permen PUPR 12 TAHUN 2020, tentang peran masyarakat dalam penyelenggaraan PKP.
5. SE Dirjen Perumahan nomor 06/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

SUSUNAN ACARA

NO	ACARA	NARASUMBER	MC / MODERATOR	WAKTU
	Registrasi Peserta			08.30 – 09.00
1.	Pembukaan : ✓ Pembukaan ✓ Arahan Pimpinan BP2P Maluku	✓ Kepala Bappeda ✓ Kepala Seksi BP2P Maluku	MC	09.00 – 09.30
2.	Evaluasi; Laporan Kinerja Pokja PKP Kota Ambon	Ketua Pokja PKP	Panita	09.30 – 09.50
3.	Diskusi dan Tanya Jawab			09.50 – 10.00
4.	a. Ruang Lingkup Tugas Pokja PKP/Forum PKP / b. Penyusunan Program Pokja PKP c. Pembentukan Forum PKP d. Urgensi RP3KP	TA Perencanaan & Kelembagaan Perumahan BP2P Maluku	Panita	10.00 – 11.00
5.	Diskusi dan Tanya Jawab			1:50 – 12.00
6.	ISOMA			12:00 – 13:00
7.	Capaian Program Sejuta Rumah dan Perbaikan RTLH di Kota Ambon			13:00 – 13:30
8.	Desk , diskusi dan tanya jawab: RP3KP, Program Pokja PKP dan Capaian Data PSR	Tim BP2P Maluku	Panita	13:30 – 15:30
9.	Penutup	PPK BP2P Maluku	MC	15:30

Lampiran 2 : Surat Kepalai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku
Nomor : UM.01.02-Rb17/310
Perihal : Undangan Diseminasi Data Demand dan Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon

Surat ditujukan Kepada Yth.:

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA AMBON :

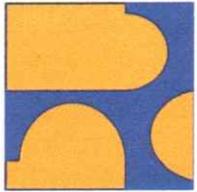
1. Sekretaris Daerah Kota Ambon
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ambon
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Ambon
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon
7. Kepala Badan Pertanahan / ATR Kota Ambon
8. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Ambon
9. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon
10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon
11. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kota Ambon
12. Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon
13. Kepala Badan Pelanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon
14. Ketua Pokja PKP Kota Ambon

LEMBAGA NON-PEMERINTAH / OPD:

1. Kepala Bank BRI Cabang Ambon
2. Kepala Bank Mandiri Cabang Ambon
3. Kepala Bank Nasional Indonesia Cabang Ambon
4. Kepala Bank BTN Cabang Ambon
5. Kepala Bank Penin Cabang Ambon
6. Direktur PDAM Kota Ambon
7. Kepala PT. PNL Persero Wilayah Maluku dan Maluku Utara
8. Ketua BAZNAS Kota Ambon
9. Ketua Organisasi Masyarakat Peduli Perumahan Pemukiman Indonesia

LAMPIRAN B

(Absensi Peserta)



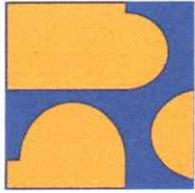
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI MALUKU

Jl. Akiula Raya Blok 6 No. 19, Perum Wayame Permai, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon | email : maluksnv12021@gmail.com

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Rabu, 14 Juni 2023
TEMPAT : KANTOR DINAS PKP KOTA AMBON

NO	NAMA	INSTANSI	NO HANDPHONE	TANDA TANGAN
1.	Denny kw	PKN	08223 18638	
2.	Nirwana	PKN	08295452345	
3.	Annisa.	BTN	0811 872839	
4.	F. LUKA TOMPESSY	DPPKB KOTA AMBON	0811 476 152	
5.	Hj. Moch Fiaz	CAZNAS	0812 310666 36	
6.	G.W. Nasulohy	DP3 AMB.	082399761653	



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI MALUKU**

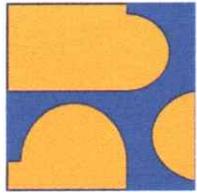
Jl. Akiula Raya Blok 6 No. 19, Perum Wayame Permai, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon | email : malukunvt2021@gmail.com

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL :

TEMPAT :

NO	NAMA	INSTANSI	NO HANDPHONE	TANDA TANGAN
7	M. Leiwakobessy	DINSOS Kota	085238252006	
8.	Ernawati	DPKRP	085329605669	
9.	Alvardo F. T	BRN	082243131918	
10.	Santi Pravia	BRN	081298605585	
11.	ERICO . I. MATAHERU.	DPKRP	081343386240	
12.	F. Riupassa	PPRUP.	0812 4814 7171	



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI MALUKU
Jl. Akiuia Raya Blok 6 No. 19, Perum Wayame Permai, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon | email : malukusnvt2021@gmail.com

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL :

TEMPAT :

NO	NAMA	INSTANSI	NO HANDPHONE	TANDA TANGAN
13.	J. M. Alfons	DPRIKP	082290191556	
14.	G. A. Lapulalan	DPRIKP	082271147015	
15	F. Sihombing	BPBD		

Daftar Hadir

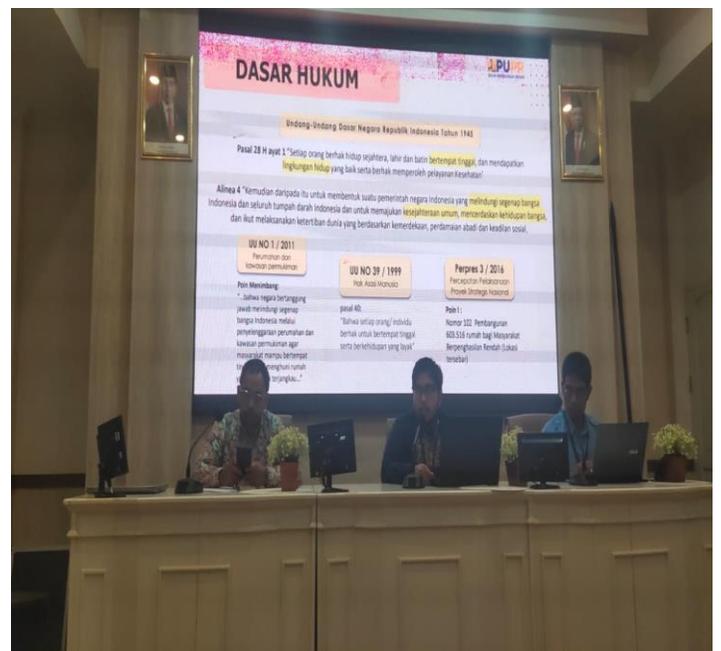
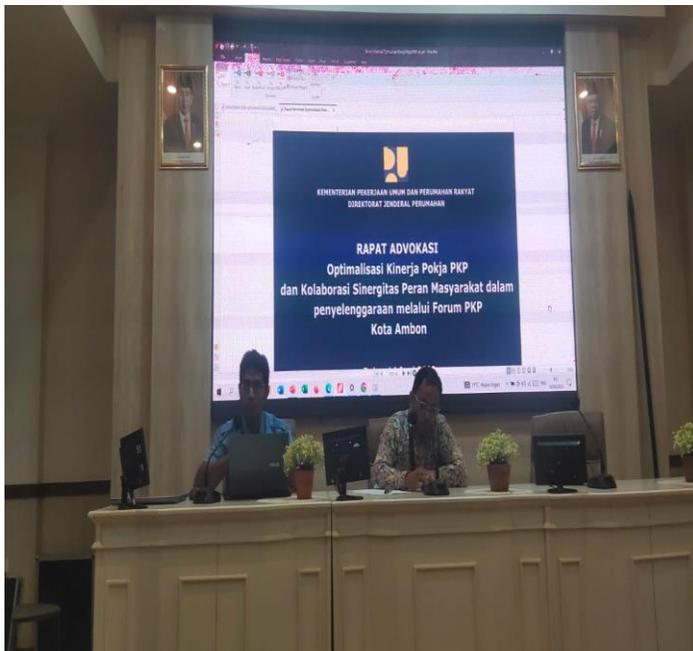
No.	Nama	Jabatan	Alamat	TTD
1	EPWIN S Aji	KABID	KOTA AMBON	
2	LEGION. K. A. KOPONG	staf	DEKUR.	
3	T. Riu Passa	staf.	PERUB.	
4	CHRISTA ANJELICA	STAF	DEKUR.	
5	Gabrielle. Manusina	staf	PERUB.	
6	Moh. Ibrahim H. RUMAHAN	STAF	PERUB.	
7	ARNALDO F. TOURMANA	CBM	BRU Ambon	
8	Santi. Prowira	Rm	BRU Ambon	
9	Hj. NON Kom	Manajemen	BAZNAS	
10	M. Lewakoberry	Kabid	PINSOS Kota	
11	Lyl. NAMLOHY	Staf	DPBATA B KOTA	
12	YANY D. TUHUMURY	PRAKOM AHLI MUDA	BPS KOTA AMBON	
13	M. PERA YOROKER	AO	PATUH BATE	
14	Zadrab. Risnoffa	staf	DEKUR	
20	A. Yufetimeny	staf	DEKUR	
21	M. Yufetimeny	staf	DEKUR.	
22	CHARWIN SAMSON	Staff	PERKIM	
23	M. NAK ABDULLAH	STAF	PENYIA KOTA AMBON	
24	THOMAS NEMAY	STAF	PENYIA KOTA AMBON	
25	DANIEL NAMLOHY	STAF	PERKIM KOTA	
26	Rendie. Annalab	Manajemen pengendali Lampak Lingsar	D LHP kota Ambon	
27	FREDDY CERATONPEBY	KASIE	DPPKB Kota Ambon	
28	B. R. Atarawamar	Kabid	DPM PTSP Kota Ambon	
29	Ernawati	staf	DDKSP	
30	J. B. LATTINGJA	STAF PERUB	PRAM AMBON	

LAMPIRAN C

(Dokumentasi Kegiatan)



(Sesi Arahan dan Pembukaan Diseminasi-Advokasi)



(Sesi Pemaparan Materi Dari Narasumber)



(Sesi Sharing Diskusi)



(Sesi Foto Bersama Peserta Kegiatan Diseminasi-Advokasi di Kota Ambon)

LAMPIRAN D

(BAHAN TAYANG NARASUMBER)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

RAPAT ADVOKASI Optimalisasi Kinerja Pokja PKP dan Kolaborasi Sinergitas Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan melalui Forum PKP Kota Ambon

Rabu, 14 Juni 2023

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

OUT LINE



Dasar Hukum

UU Nomor 1 tahun 2011 tentang PKP dan sesuai perubahannya UU Nomor 1 tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

PP Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan PKP:

PP Nomor 54 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PKP dan Perubahannya PP Nomor 12 tahun 2021;

Permen PUPR Nomor 12 tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP.



UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Ditjen Bina Pembangunan Daerah



Pengertian

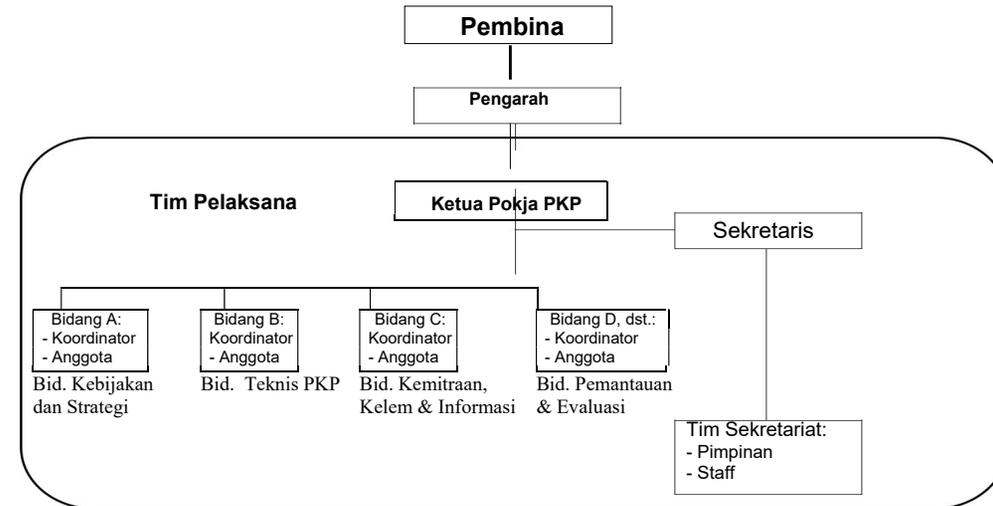
Pokja PKP

Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Pokja PKP) adalah lembaga yang mengkoordinasikan, ("mensinkronisasikan mengintegrasikan) urusan Pengembangan PKP (pada tingkatan masing-masing).
 *Pasal 1 angka 5 Permen PUPR 12/2020
 *Pasal 5 ayat 1 dan 3 PP 14/201

Forum PKP

Forum pengembangan PKP (Forum PKP) adalah Wadah untuk memperemukan dan mebicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP.
 *pasal 131 uu 1/2011
 *pasal 16 PP 88/2014

Struktur Pokja PKP



Struktur Keanggotaan Pokja PKP Kabupaten/Kota

Pembina	: Bupati/ Walikota
Tim Pengarah	
Ketua	: Pejabat Eselon II Sekretariat Daerah
Wakil Ketua	: Pejabat Eselon II Bappeda
Anggota	: Pejabat Eselon II OPD terkait; DPKP, DPU)
Tim Pelaksana	:
Ketua	: Pejabat Eselon III Bappeda yang membidangi urusan infrastruktur dan pengembangan wilayah
Sekretaris	: Pejabat Eselon III OPD yang membidangi urusan PKP
Anggota	: Pejabat Eselon III OPD terkait : a. Perencanaan b. Perumahan dan Kawasan Pemukiman c. Pertanahan d. Lingkungan Hidup
Bidang - Bidang	a. Kebijakan dan Strategi b. Teknis PKP c. Sanitasi dan Air Minum d. Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi e. Pemantauan dan Evaluasi

Struktur Dan Pembentukan Forum PKP

Forum PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas unsur:

- Instansi pemerintah yang terkait dengan bidang PKP;
- Asosiasi perusahaan penyelenggara PKP;
- Lembaga jasa keuangan (Perbankan);
- Asosiasi profesi penyelenggara PKP;
- Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara PKP;
- Pakar di bidang PKP;
- Akademisis; dan/atau
- Lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan PKP

Struktur organisasi Forum PKP paling sedikit terdiri atas:

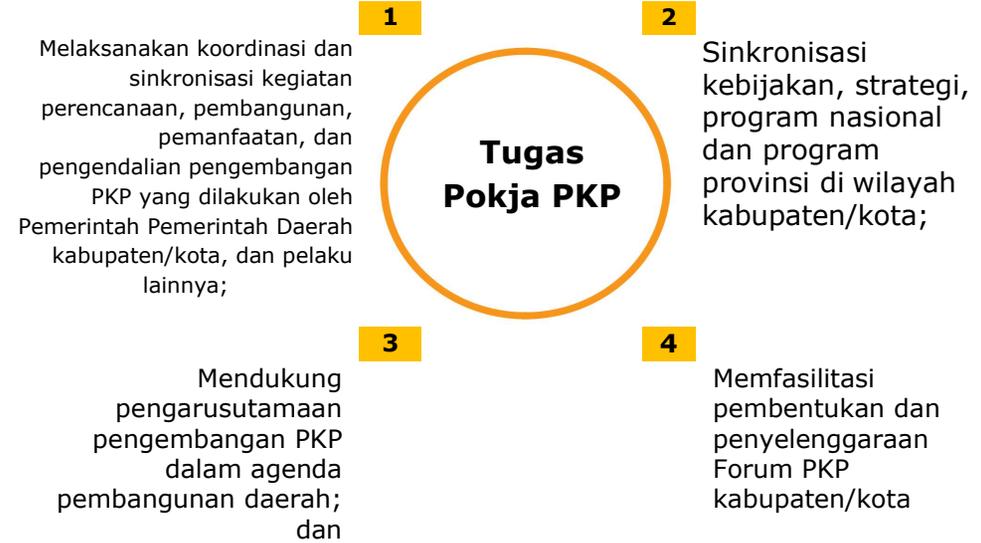
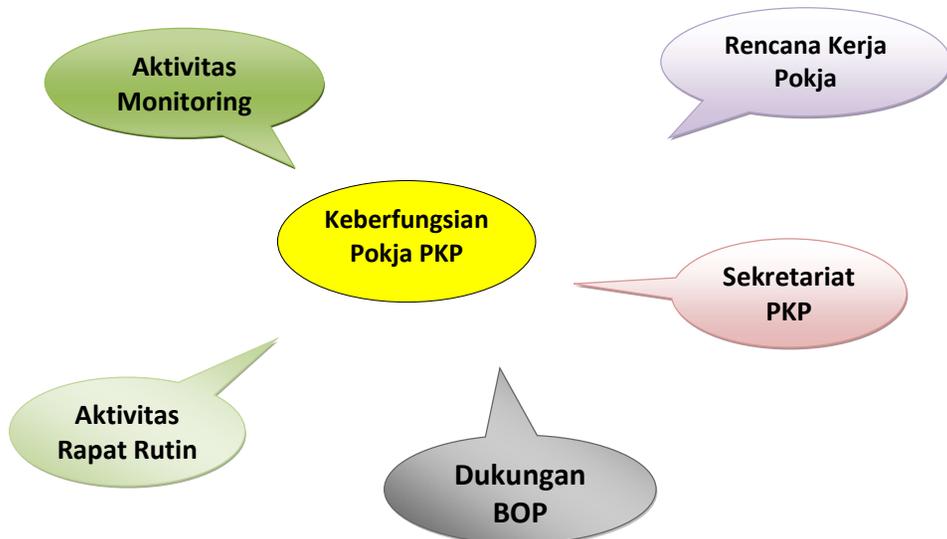
- Ketua;**
- Sekretaris; dan**
- Anggota.**

URTGENSI POKJA PKP DAN FORUM PKP

Alasan utama atau urgensi perlunya Pokja PKP dibentuk, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, antara lain:

1. Perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan yang kompleks, multisektor, dan multiaktor (pemangku kepentingan).
2. Terdapat *gap* atau perbedaan pemahaman dan pengetahuan dari para pelaku serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan PKP.
3. Koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dalam penyelenggaraan PKP masih belum optimal.
4. Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan PKP masih lemah.
5. Pengarusutamaan sektor PKP dalam dokumen pembangunan daerah masih belum optimal/sangat minim.
6. Kualitas dokumen perencanaan terkait PKP kurang komprehensif dan kurang sinkron antara satu dengan yang lainnya (masih sangat sektoral).
7. (terkadang) Terjadi tumpang tindih atau justru kekosongan (*idle*) program/kegiatan dalam penanganan kebutuhan penyediaan layanan bidang PKP.

5 Indikator Keberfungsan Pokja PKP



Tugas dan Fungsi Pokja Forum PKP dan Pendanaan

Tugas dan fungsi:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat;
- b. Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan Penyelenggaraan PKP;
- c. Meningkatkan peran dan pengawasan Masyarakat;
- d. Memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang Penyelenggaraan PKP.

Pendanaan

Forum PKP
(27) 12/2020

Pokja PKP
(39) 12/2020

Pendanaan pelaksanaan tugas Forum PKP diperoleh dari Pokja PKP sesuai dengan kewenangannya.

(1) Pendanaan pelaksanaan tugas Pokja PKP nasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

(3) Pendanaan pelaksanaan tugas Pokja PKP di tingkat Kabupaten/Kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten /Kota.

Sinergi dan Titik Temu Pemerintah dan Masyarakat

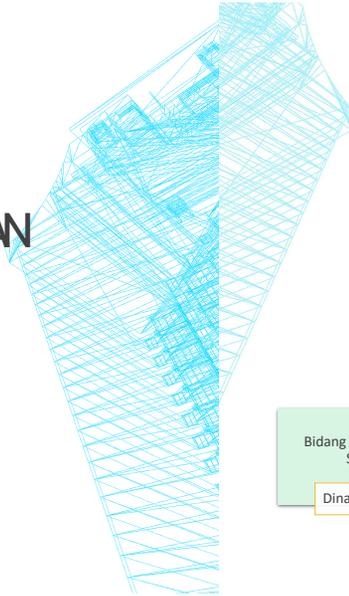


Sinergi dan Titik Temu Pemerintah dan Non-Pemerintah dalam Penyelenggaraan PKP

TERIMA KASIH



KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (POKJA PKP) KOTA AMBON



POKJA PKP KOTA AMBON SK Walikota Ambon Nomor 325 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon



PENILAIAN KINERJA POKJA PKP KOTA AMBON (KOTAKU)

No	Aspek	Indikator	Bobot	Nilai	Batasan penilaian	Nilai Kota / Kab.	Keterangan / Penjelasan
1	Kelembagaan Aktif	Pokja PKP/Lembaga Sejenis Aktif Fasilitas penanganan Kumuh (Bijakan ke penilaian keberfungsian pokja PKP).	20%	2	Pokja PKP Aktif (Ada Rencana Kerja, ada sekretariat, ada BOP, ada rapat dan ada monitoring minimal 3 kali dalam setahun)	1	Pokja PKP belum memiliki anggaran BOP, rencana kerja belum berjalan maksimal
				1	Pokja PKP Kurang Aktif		
				0	Pokja PKP atau lembaga sejenis tidak aktif		
2	Dokumen Perencanaan Penanganan Kumuh Kota	Dokumen Rencana Perencanaan dan Pemeliharaan Kualitas Permukiman Kumuh Kota/Kabupaten sudah disiapkan dan diayaskan	15%	2	Ada RP2KPK/SIAP , sudah disiapkan dan diayaskan/direalisasikan kegiatannya	1	Dokumen SIAP Kota Ambon sudah disiapkan
				1	Ada dokumen RP2KPK/SIAP sudah disiapkan		
				0	Belum ada dokumen RP2KPK/SIAP		
3	Regulasi Penanganan Kumuh	Regulasi yang mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman Kumuh Kota/Kabupaten (Perda Perumahan & Kawasan Permukiman)	10%	2	Ada Perda Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan sudah di implementasikan	2	Perda Perumahan dan Permukiman Kumuh dan sudah diimplementasikan
				1	Ada Perda Perumahan dan Kawasan Permukiman		
				0	Belum ada Perda Perumahan dan Kawasan Permukiman		
4	Pengelolaan database Permukiman dan Permukiman Kumuh	Perda menggunakan data Profile Permukiman dan Permukiman Kumuh sebagai dasar penanganan Kumuh	5%	2	Sudah ada Profile Permukiman dan Permukiman Kumuh dan sudah dijadikan sebagai dasar penanganan kumuh	2	Sudah ada profil permukiman dan permukiman kumuh dan sudah dijadikan dasar penanganan permukiman kumuh baik oleh Pemda maupun pihak lainnya
				1	Sudah ada Profile Permukiman dan Permukiman Kumuh		
				0	Belum ada Profile Permukiman dan Permukiman Kumuh		
5	Sosialisasi dan edukasi Penanganan Kumuh	Media dan Kegiatan Sosialisasi/edukasi penanganan dan peningkatan kualitas permukiman Kumuh	5%	2	Sudah ada media dan kegiatan sosialisasi/edukasi tentang penanganan kumuh yang rutin	0	
				1	Sudah ada media dan kegiatan sosialisasi/edukasi tentang penanganan kumuh		
				0	Belum ada media dan kegiatan sosialisasi/edukasi tentang penanganan kumuh		
6	Forum Kolaborasi Kota	Forum Kolaborasi adalah bentuk aktifitas, melibatkan unsur lain disamping keanggotaan pokja PKP (Anggota KDN). Memiliki agenda yang jelas dalam upaya penanganan kumuh	5%	2	Ada aktifitas Forum Kolaborasi Kota dalam kegiatan penanganan kumuh kota dan memiliki agenda yang jelas	0	
				1	Ada aktifitas Forum Kolaborasi Kota dalam kegiatan penanganan kumuh kota		
				0	Tidak ada aktifitas Forum Kolaborasi Kota		
7	Penilaian Kinerja BKM/LKM	Penilaian kinerja BKM/LKM dalam Kota/Kab pada tahun penilaian	5%	2	100 % BKM/LKM sudah kategori mandiri dan lebih dari 5 % diantaranya sudah kategori menuju mandiri	1	Semua BKM sudah mandiri, namun belum ada BKM yang menuju mandiri
				1	BKM/LKM kategori Mandiri 100%		
				0	BKM/LKM dengan kategori Mandiri Kurang dari 100%		
8	Integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan	Usulan kegiatan yang bersumber dari RPLP dan RP2KPK/SIAP yang diterima dalam Musrenbang Kota/Kabupaten dan didanai oleh APBD	15%	2	Ada usulan kegiatan yang bersumber dari RPLP dan RP2KPK yang diterima dalam Musrenbang Kota/Kabupaten dan didanai oleh APBD	1	Ada beberapa usulan dalam RPLP dan RP2KPK yang pendanaannya oleh APBD, Misalnya: Drainase, Jalan Lingkungan, rehab RTLH
				1	Ada usulan kegiatan yang bersumber dari RPLP dan RP2KPK yang diterima dalam Musrenbang Kota/Kabupaten dan didanai oleh APBD		
				0	Tidak ada usulan kegiatan yang bersumber dari produk perencanaan (RPLP dan RP2KPK) didanai oleh APBD		
9	Kolaborasi Penanganan Kumuh	Jumlah BKM/LKM yang melakukan kolaborasi terhadap penanganan kumuh	5%	2	Jumlah BKM/LKM yang melakukan kolaborasi hingga tahun penilaian lebih dari 50%	0	
				1	Jumlah BKM yang melakukan kolaborasi hingga tahun penilaian kurang dari 50%		
				0	Belum ada BKM yang melakukan kolaborasi hingga tahun penilaian		
10	Pengurangan Luasan Kumuh	Berkurangnya persentase luasan kumuh Kota/Kabupaten berdasarkan SK Kumuh Kab/Kota	15%	2	Jumlah pengurangan kumuh Kota/Kabupaten diatas 80%	1	Dari luas kumuh awal sebesar 159,51 Ha, saat ini sudah berkurang sebesar 27,42 Ha (17%)
				1	Jumlah pengurangan kumuh Kota/Kabupaten dibawah 80%		
				0	Tidak terjadi pengurangan kumuh		
TOTAL						50	Sedang

KEBERFUNGSIAN POKJA PKP KOTA AMBON



Telah Terbentuk nya Pokja PKP sesuai Permen PUPR No.12 Tahun 2020 dengan SK Walikota Ambon Nomor 325 tahun 2021

- Sekretariat**
Pokja memiliki Sekretariat (Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon)
- Rencana Kerja**
Pokja Memiliki rencana kerja tahunan dengan target kegiatan Skala Kawasan, Skala Lingkungan dan pemenuhan layanan dasar <80%
- Dukungan BOP**
Belum Tersedianya dukungan BOP
- Pertemuan Rutin**
Pokja Kota Ambon belum mempunyai agenda pertemuan rutin minimal 1 bulan 1 kali. Pertemuan Pokja dilakukan secara insidental
- Monitoring**
Pokja Melakukan Monitoring pada kegiatan Capaian pengurangan Kumuh, Capaian Layanan 80 % dan Kolaborasi

RENCANA KERJA POKJA PKP KOTA AMBON

No	Uraian Kegiatan	Target	Support Unit	Durasi Waktu
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN KAJIAN				
1	Pembahasan Rencana O dan P dan Pengembangan kawasan Wainitu	Adanya kesepahaman dan keterpaduan dalam pelaksanaan Pengelolaan dan Pemeliharaan Kawasan Wainitu	Satker P2P Prop.Maluku, Tim Kotaku, Tim TMC	Januari – April 2023
2	Persiapan usulan (RC)Penanganan Kumuh skala kawasan dan DAK Tematik 2024	Memastikan seluruh persiapan terkait Perencanaan skala kawasan dan DAK Tematik 2024 dapat dislesaikan	Satker P2P Prop.Maluku, Tim Kotaku	Januari – Juni 2023
3	Penyusunan Dokumen RP3KP	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Satker P2P Prop.Maluku, Tim Kotaku	Januari – Desember 2023
4	Penyusunan Dokumen RP2KPKPK	Tersusunnya Dokumen Penanganan Permukiman Kumuh Menuju Permukiman Yang Layak Huni dan Berkelanjutan	Satker P2P Prop.Maluku, Tim Kotaku	Januari – Desember 2023

RENCANA KERJA POKJA PKP KOTA AMBON

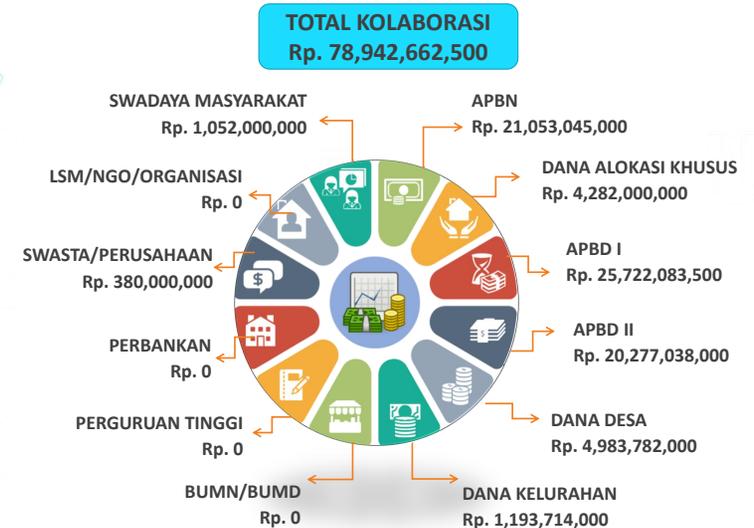
lanjutan...

No	Uraian Kegiatan	Target	Support Unit	Durasi Waktu
KOLABORASI PENANGANAN KUMUH				
1	Fasilitasi Perencanaan Penanganan Kumuh Lewat APBD,APBN, dan Pihak Lainnya	Terlaksananya program dan Kegiatan Penanganan Kumuh	Tim Kotaku	Januari – Desember 2023
2	Pembentukan Forum PKP	Adanya Wadah untuk membangun komitmen bersama seluruh stakeholder dalam kolaborasi penanganan kumuh		Januari – Juni 2023
PENGELOLAAN DATA SIM PENANGANAN KUMUH				
1	Integrasi MIS Dit. PKP dengan MIS Kota/Kabupaten	Terintegrasinya seluruh data Penanganan Kumuh Tingkat Kota Oleh Pemda, dan Terlaporkan Kepada Dit.PKP	Tim Kotaku	Januari – Juni 2023
PENGUATAN KAPASITAS ANGGOTA POKJA PKP				

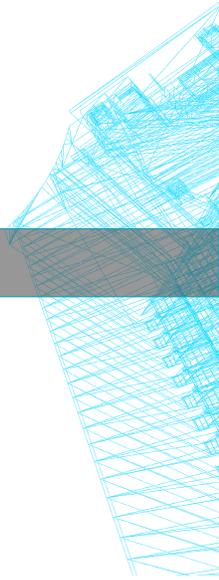
ISU STRATEGIS PENCAPAIAN TARGET PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Isu dan Permasalahan	Strategi	Upaya Tindak Lanjut
1	Pengelolaan Skala Kawasan yang sudah terbangun	Persiapan Serah Terima dan Alih Kelola Asset Skala Kawasan (Estate Management)	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan Pengorganisasian Masyarakat/komunitas dan tingkat Kota Fasilitasi proses serah terima asset sesuai mekanisme yang berlaku. FGD Penyepakatan Aturan Bersama, Penyepakatan Kegiatan profit dan non profit, penyepakatan struktur Organisasi Pengelola (termasuk didalamnya KPP, Komunitas, Kelompok pemerhati dan OPD), Perumusan Bisnisplan pengelolaan kawasan, Pembentukan badan pengawas pengelolaan kawasan (bila dibutuhkan)
2	Adanya Dokumen Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kumuh)	Penyusunan Dokumen RP3KP dan RP2KPKPK	<ol style="list-style-type: none"> Adanya Penganggaran dalam rangka penyusunan Dokumen RP3KP dan RP2KPKPK Timeline Penyusunan Dokumen RP3KP dan RP2KPKPK Legalisasi Dokumen Melalui Perda dan atau Perwali
3	Penanganan Kawasan Kumuh (Tuntas Kumuh)	Penyusunan Masterplan Kawasan Prioritas	<ol style="list-style-type: none"> Verifikasi Penanganan Skala Kawasan Yang Belum Tuntas (Basis RP2KPKPK) Penentuan Blok/Zona Kawasan Prioritas yang belum terintervensi (Belum Tuntas) FGD Penyusunan Masterplan dan Siteplan Skala Kawasan Menyusun Memorandum Program/Rencanan Investasi dengan Skema Kolaborasi Menyusun Dokumen Eksum dan kelengkapan RC untuk kebutuhan DAK Integrasi dan Skala Kawasan Reguler
4	Laporan Capaian Penanganan Kumuh Tingkat Kota	Penyusunan Laporan Kinerja Pokja PKP	FGD Pokja Dalam Rangka Penyusunan Laporan Kinerja Pokja PKP

REALISASI KOLABORASI PENYELENGGARAAN PKP KOTA AMBON 2021-2022



TERIMA KASIH





CAPAIAN PROGRAM SEJUTA RUMAH (PSR) DAN PERBAIKAN RTLH DI KOTA AMBON



~TAPP PENDATAAN MALUKU~
(TILA.YESPENSA.SAYA,S.P.W.K)



PERAN DAN TUJUAN BALAI PADA DISEMINASI DAN ADVOKASI



Koordinasi dan
menjamin ketersediaan
data terkait perumahan
yang valid dan akurat
sesuai dengan format
basis data perumahan

Memberikan
Pendampingan kepada
Pokja dalam
pengumpulan data
perumahan

Mewujudkan kolaborasi
dalam pendataan perumahan
provinsi dan kabupaten/kota

Membangun dan mengelola
Satu Data Indonesia
bidang perumahan



URGENSI !!! PENYEDIAAN PERUMAHAN



Data Terakhir BPS Tahun
2022 Populasi Penduduk
Tembus 265,77 Juta Jiwa

Backlog/kekurangan huniaan
yang tidak terkendali dan
RTLH yang tinggi



Tidak dapat dipungkiri kondisi populasi penduduk tiap tahunnya meningkat, sehingga hal tersebut berimplikasi terhadap permintaan tiap individu akan suatu rumah tinggal/hunian demi melangsungkan kehidupan. Hal tersebut juga beriringan dengan status sosial tiap individu yang memiliki keterbatasan penghasilan yang berbeda yang mana ditambah lagi kondisi lahan dan harga rumah yang meningkat sehingga terkadang rumah tinggal/hunian sulit dijangkau maupun terbatasnya sarana-prasarana pendukung perumahan/pemukiman yang memadai. Melihat hal tersebut menjadi tuntutan yang paling penting bagi pemerintah dalam hal penyediaan rumah tinggal/hunian bagi tiap individu tersebut guna pemenuhan kebutuhan utama dan demi pemerataan kesejahteraan.

DASAR HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 H ayat 1 "Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin **bertempat tinggal**, dan mendapatkan **lingkungan hidup** yang baik serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan"

Alinea 4 "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia** dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan **kejahteraan umum**, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

UU NO 1 / 2011
Perumahan dan
kawasan permukiman

Poin Menimbang:
"...bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau..."

UU NO 39 / 1999
Hak Asasi Manusia

pasal 40:
"Bahwa setiap orang/ individu berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak"

Perpres 3 / 2016
Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional

Poin 1 :
Nomor 102 Pembangunan 603.516 rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lokasi tersebar)

DASAR HUKUM
PENDATAAN PROGRAM SATU JUTA RUMAH



UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman



Pemerintah Pusat

Pasal 16 huruf b

Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang:
Menyusun dan **menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman**

Pemerintah Kabupaten/ Kota

Pasal 18 huruf a

Pemerintah kabupaten/ kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang:
Menyusun dan **menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/ kota**

Pemerintah Provinsi

Pasal 17 huruf a

Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang:
Menyusun dan **menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi**

Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan PKP (Pasal 18 ayat 1). Pengembangan sistem informasi dan komunikasi dilakukan melalui menyusun dan menyediakan basis data, pemutakhiran data dll

UMUMNYA TANTANGAN PENYEDIAAN PERUMAHAN



URGENSI PROGRAM SEJUTA RUMAH (PSR)

PERAN PEMERINTAH



Pentingnya Program Sejuta Rumah (PSR)

Bertujuan Dapat mengurangi *backlog* dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni

Program Sejuta Rumah(PSR) merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan para pemangku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat penghasilan rendah (MBR) yang telah dicanangkan Presiden RI sejak Tahun2015 dengan capaian akhir Tahun 2022 mencapai 7.288.815 unit dengan capaian Tahun 2022 sendiri sebesar 1.117.491 unit dan rencananya target Tahun 2023 sebesar 1.176.830 unit



Selain intervensi-intervensi yang telah berlangsung, terdapat beberapa isu fundamental yang membutuhkan solusi agar tidak menghambat para stakeholder untuk berkembang.



ISU DAN TANTANGAN PENYELENGGARAN PERUMAHAN



SIAPA SIH YANG PALING BERPERAN PENTING DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN ???

PASTINYA PANGGILAN BERSAMA SELURUH LAPISAN STAKHOLDER BAIK DI PUSAT MAUPUN DUKUNGAN POKJA PKP, DAERAH/PEMDA, PENGEMBANG, K/L DLL



Mengapa Pemerintah Perlu Menyediakan Rumah Layak?

1. Amanat Pasal 28 H Ayat (1) dan (2) UUD 1945 yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yaitu "Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak".
3. Sejalan dengan Agenda Global SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) 2030

- Goals 6.1.1 Akses air minum
- Goals 6.2.1 Akses sanitasi
- Goals 11.1.1 Akses rumah layak huni



Wujud komitmen Pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar ditetapkan dalam Perpres No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Mengamanatkan perlunya sinergi SDGs dengan RPJMN dan RPJMD

Sumber : Sekretariat Wapres

Mengapa Pemerintah Perlu Menyediakan Rumah Layak?

4. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan SDGs beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.



Tujuan ke-11 SDGs: menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan

7 AGENDA PEMBANGUNAN	
	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

HIGHLIGHT SASARAN 2024	
	70% Rumah Tangga Menikmati Hunian Layak
	100% Hunian dengan Akses Air Minum Layak > 70% Terjangkau Akses Air Minum 15%
	90% Hunian dengan Akses Sanitasi Layak > 70% Terjangkau Akses Air Minum 15%
	30% Hunian dengan Akses Air Minum Perpipaan

Sumber : Sekretariat Wapres

Mengapa Pemerintah Perlu Menyediakan Rumah Layak?

5. Selain sebagai tempat berteduh, rumah merupakan madrasah dan sarana membangun masyarakat yang baik
6. Rumah yang sehat dan berkualitas akan meningkatkan kesehatan dan produktivitas masyarakat
7. Pembangunan sektor perumahan menyerap jutaan tenaga kerja
8. Pembangunan sektor perumahan memberikan dampak multiplier bagi banyak sektor lain

Sumber : Sekretariat Wapres

Mengapa Pemerintah Perlu Menyediakan Rumah Layak?



9. Berkontribusi pada upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting (Fokus Wapres)

Ada banyak faktor yang berkontribusi pada upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting, di antaranya kesehatan lingkungan, terutama terkait sanitasi dan ketersediaan air minum layak, serta rumah yang layak huni.



Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
Pemerintah menargetkan 100% rumah tangga mempunyai akses terhadap air minum layak dan 90% rumah tangga mempunyai akses terhadap sanitasi layak pada 2024.



Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Instruksi kepada Menteri PUPR:
→ Menyiapkan ketersediaan air bersih, sanitasi, dan penataan lingkungan;
→ Memberikan bantuan perbaikan rumah/atau pembangunan rumah baru serta relokasi pemukiman bagi keluarga miskin ekstrem.

Sumber : Seketariat Wapres

PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENDATAAN PERUMAHAN

1 PEMERINTAHAN PUSAT

1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman
2. Menyelenggarakan Forum Data Perumahan
3. Membangun dan mengelola Satu Data Perumahan

2 PEMERINTAHAN PROVINSI

1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi
2. Membentuk **Pokja PKP dan Forum PKP Provinsi**, yang salah satunya berfungsi sebagai wadah koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah provinsi untuk mendukung penyediaan data perumahan tingkat provinsi
3. Menyelenggarakan Forum Data Perumahan Provinsi
4. Mengembangkan aplikasi/ sistem informasi pendataan perumahan di tingkat provinsi

3 PEMERINTAHAN KAB/KOTA

1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota
2. Membentuk **Pokja PKP dan Forum PKP Kabupaten/Kota**, yang salah satunya berfungsi sebagai wadah koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah kabupaten/kota untuk mendukung penyediaan data perumahan tingkat kabupaten/kota
3. Menyelenggarakan Forum Data Perumahan Kabupaten/Kota
4. Mengembangkan aplikasi/ sistem informasi pendataan perumahan di tingkat provinsi

KETERLIBATAN
PMDA SANGAT
PENTING DALAM
PENDATAAN SESUAI
AMANAT (UU NO.1
2011 DAN PP 8 8
TAHUN 2014)



UPAYA WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENINGKATAN PENYELENGGARAN PENDATAAN PERUMAHAN



1 Penguatan kapasitas staf Dinas PKP dalam pendataan, pengelolaan data dan informasi

4 Penyelenggaraan Forum Data PKP secara berkala

2 Pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga (pendukung) pendataan PKP

5 Penyebarluasan informasi terkait hasil pendataan PKP kepada publik

3 Melakukan sinergi dalam pendataan multi pihak di Pokja PKP dan Forum PKP

6 Penyelenggaraan pusat data dan layanan informasi PKP (klinik perumahan) di daerah

01 Internalisasi Indikator Pembangunan Bidang PKP Nasional dalam Dokumen Perencanaan Daerah

05 Mengklasifikasi dan Mengkolaborasi Dana dan/atau Biaya Pembangunan Perumahan Bagi MBR

02 Optimalisasi Kolaborasi Berbagai Stakeholder melalui Pokja dan Forum PKP Daerah

06 Optimalisasi Pemanfaatan Fasilitas dan Potensi Pembiayaan Eksisting Pemerintah (seperti DAK, Integrasi, FLPP, Dana Desa, dll)

03 Membangun Sistem Manajemen Pendataan PKP Yang Up To Date dan Valid

07 Mengawasi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional pada Tingkat Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

04 Inisiasi Program Inovatif melalui Berbagai Program Unggulan Daerah



DUKUNGAN PEMERINTAH PADA PSR



Sisi Demand

(Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memperoleh rumah)



Bantuan Langsung

1. Bantuan pembangunan rusunawa
2. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) baik peningkatan kualitas & pembangunan baru
3. Bantuan rumah khusus



Bantuan Financing (tahun 2022 sebesar Rp28 triliun)

1. Bantuan uang muka (SBUK) (225.987 unit)
2. FLPP (226 ribu unit)
3. Subsidi Selisih Bunga (769.903 unit)



Kemudahan sertifikasi dan insentif perpajakan

1. Kemudahan sertifikasi di BPN dengan PTSL – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (14 hari, biaya diatur besarnya berdasarkan SKB 3 menteri)
2. Pemotongan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan retribusi IMB (Inpres 5 Tahun 2016), pelaksanaannya diatur Perda (sekarang IMB menjadi PBG/Peretujuan Bangunan Gedung)

DUKUNGAN PEMERINTAH PADA PSR



Sisi Supply

(untuk meningkatkan kapasitas pengembang untuk menghasilkan rumah)



Kemudahan perizinan

1. Penerbitan PP 64/2016 mereduksi perizinan hingga 44 hari untuk 11 perizinan
2. Penerbitan Permendagri 55/2017
3. Relaksasi Permenhub Bebas Andal Lalin dari sebelumnya 150 unit menjadi 300 unit



Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

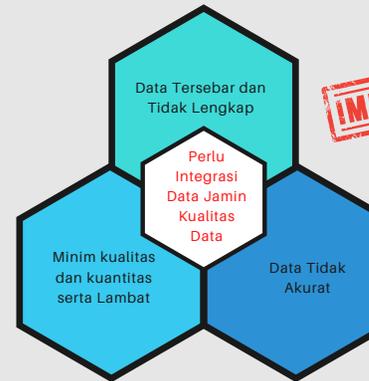
Bantuan dikelola oleh Kementerian PUPR Ditjend Penyediaan Perumahan. Nilai bantuan per unit hingga Rp6,2 juta. Pengajuan bantuan PSU saat ini dapat dilakukan secara online



Insentif perpajakan

1. Pembebasan nilai PPN untuk nilai rumah tertentu (dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK/010.2019)
2. Penurunan PPH dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari 5% menjadi 2,5% untuk rumah komersil dan 1% untuk rumah MBR (dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016)

PENGEMBANGAN SATU DATA PERUMAHAN



Tersedianya data yang berkualitas akan membuat keputusan yang diambil pembuat kebijakan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran. Sebaliknya, informasi yang tidak akurat kemungkinan besar akan membuat kebijakan yang diambil pun menjadi keliru.



Keakuratan dan Kelengkapan Data Perlu dijaga dan diperhatikan agar tidak tumpang tindih

PENYUSUNAN BASIS DATA PERUMAHAN

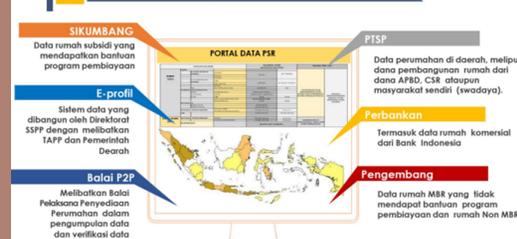
JENIS DATA YANG TERSEDIA



- 1 Basis Data Penyediaan Perumahan**
Basis Data Perumahan merupakan gabungan data demand, data supply, data gap, data sebaran pembangunan rumah, data profil perumahan, data program penyediaan perumahan;
- 2 Basis Data Perumahan Wilayah**
Merupakan data sektor perumahan per Kab/Kota – melalui forum antar stakeholder perumahan di Provinsi melibatkan seluruh Dinas PKP Kab/Kota dan Pokja PKP;
- 3 Basis Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**
Merupakan data bnba RTLH untuk usulan bantuan (program BSPS) –
- 4 Basis Data Backlog Kepemilikan dan Backlog Penghunan**
Merupakan data bnba backlog perumahan untuk data perencanaan – bersumber dengan BPS dan BKKBN.
- 5 Basis Data Geospasial**
Merupakan data sebaran koordinat penyediaan rusun, rusus, BSPS, PSU perumahan.
- 6 Basis Data Program Satu Juta Rumah**
Merupakan data pembangunan rumah baru oleh seluruh stakeholder perumahan (pusat (K/L), pemma, pengembang, masyarakat)

PENDATAAN PSR

PENDATAAN PSR



OBJEK PENDATAAN PSR

KEMENTERIAN PUPR (RUHAM SUSUN, RUHAM KHUSUS, RUHAM SWADAYA, PSU)	APBN K/L Lain	RUHAM UMUM (MBR) RUHAM KOMERSIAL (NON MBR)	Pengembang Perumahan
PEMBANGUNAN RUHAM OLEH KEMENTERIAN / LEMBAGA LAIN (RUHAM BENCANA BNFB, RUTILAHU KEMENSOS)	APBN K/L Lain	RUHAM BANTUAN CSR	Korporasi / Swasta
BSPS PEMA, RUTILAHU, PENINGKATAN KUALITAS, PEMBANGUNAN BASIS RUHAM SUSUN PEMA	APBD	PEMBANGUNAN RUHAM OLEH MASYARAKAT	Masyarakat

ALUR INTEGRASI DAN SINKRONISASI DATA MELALUI SISTEM INFORMASI



Inputing Data Sektoral Kab/Kota



Analisis dan Integrasi Data di Provinsi



Integrasi Data System



Akses Single Data System



Akses Open Data



Rencananya Target Tahun 2023 sebesar 1.176.830 unit



RENCANA TARGET CAPAIAN NASIONAL PSR

Data Capaian PSR ini merupakan data rumah terbangun ataupun yang ditingkatkan kualitasnya pada tahun berjalan 2023 yang dilaksanakan dari pihak Kementerian PUPR, K/L, Pemda, Pelaku Pembangunan (Pengembang), Swasta maupun Masyarakat melalui program perumahan di berbagai sumber pembiayaan



KESEPAKATAN TARGET PSR DI PROVINSI MALUKU

BERITA ACARA KESEPAKATAN TARGET PROGRAM SEJUTA RUMAH TAHUN 2023

Rapat: Koordinasi Target dan Strategi Pelaksanaan Program Sejuta Rumah (PSR) Tahun 2023
 Hari/Tanggal: Jumat, 17 Maret 2023
 Pimpinan: Direktur Rumah Umum dan Komersial
 Peserta: 1. Para Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
 2. Para Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi

Pada hari **Jumat** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (17-03-2023) di Hotel Novotel Tangerang, telah dilaksanakan Pembahasan Target dan Strategi Pelaksanaan Program Sejuta Rumah (PSR) Tahun 2023 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

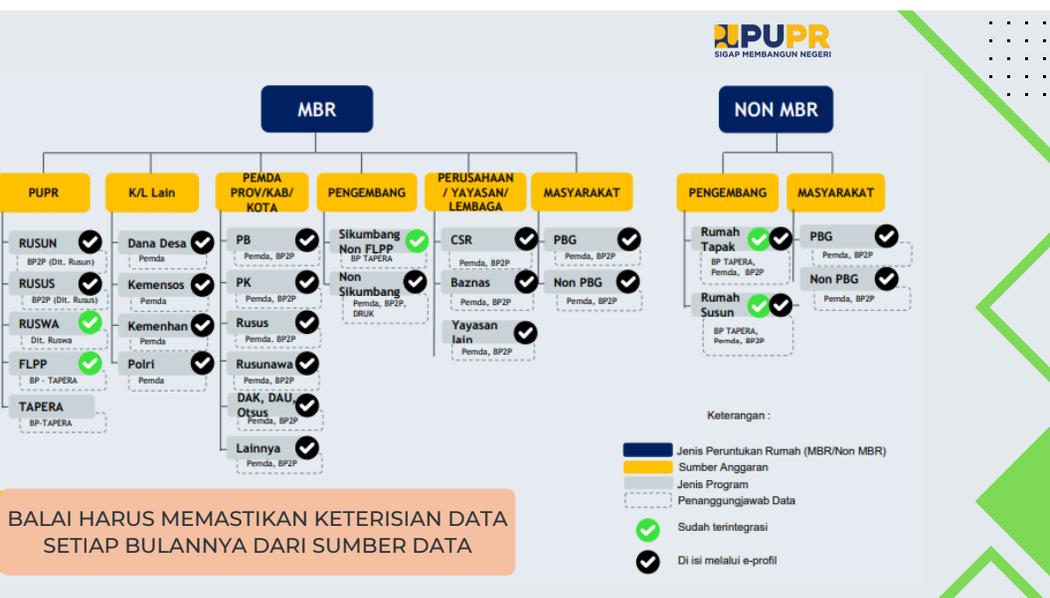
17	BALAI P2P MALUKU	12.291
	- Provinsi Maluku	6.036
	- Provinsi Maluku Utara	6.255

CAPAIAN PROGRAM SEJUTA RUMAH 2023 (MALUKU)



Capaian Program Satu Juta Rumah
6.036 Unit

TARGET SUPPLY YANG PERLU TERCAPI



JENIS DAN FUNGSI BASIS DATA !!!

DATA PERUMAHAN

- Data supply
- Data demand
- Data gap
- Data sebaran pembangunan rumah
- Data profil perumahan
- Data program penyediaan perumahan
- Data Kawasan strategis
- Data Kawasan prioritas
- Data Kawasan permukiman khusus
- Data Kawasan negative list
- Data Kawasan rawan bencana
- Data Kawasan terkondusif ekstin
- Data kualifikasi bangunan
- Data kecukupan luas bangunan
- Data akses sanitasi layak
- Data ENA RT/HL
- Data TIKET
- Data rumah tangga memiliki rumah
- Data rumah tangga menyewa rumah
- Data rumah tangga memumpang/kalunya
- ENA backlog perumahan
- Data lokasi (koordinat) rumah sesuai
- Data lokasi (koordinat) rumah khusus
- Data lokasi (koordinat) rumah sewa
- Data lokasi (koordinat) bangunan SP3/landak rumah oleh daerah
- Data lokasi (koordinat) lahan potensial untuk relokasi atau hunian bertumbuh
- Data pembangunan baru oleh pengembang
- Data pembangunan rumah baru oleh masyarakat (warranty) Lembaga non pemerintah
- Data PBG
- Data SLF

BASIS DATA PERUMAHAN

- Basis Data Penyediaan Perumahan
- Basis Data Perumahan Kewilayahan
- Basis Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- Basis Data Backlog Kepemilikan dan Backlog Kepenghunan
- Basis Data Geospasial
- Basis Data Program Satu Juta Rumah



Data diolah melalui aplikasi sistem informasi untuk menghasilkan basis data



BASIS DATA PSR PADA UMUMNYA !!!



FORM 1 A (PROVINSI)

- Data Kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman
- Data Status Pokja/Forum Perumahan
- Data Status RP3KP
- Data Demand/Kebutuhan Perumahan Tahun 2023
- Data Supply/Pembangunan Perumahan Tahun 2023
- Data Target Perumahan Tahun 2024-2026

FORM 1 B (Kab/kota)

- Data kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman
- Data Status Pokja/Forum Perumahan
- Data Status RP3KP
- Data Demand/Kebutuhan Perumahan Tahun 2023
- Data Supply/Pembangunan Perumahan Tahun 2023
- Data Target Perumahan Tahun 2024-2026

FORM SUPLAI PERUMAHAN

- Form data supply unit pembangunan baru per tahun untuk pengembang
- Form data supply unit pembangunan baru per tahun berdasarkan pengajuan KPR untuk perbankan
- Form data supply unit pembangunan baru per tahun berdasarkan PBG/IMB untuk dinas PTSP kab/kota atau yang diperoleh dari dinas PKP kab/kota serta data supply unit baru tidak melalui PBG/IMB
- Form data supply berdasarkan CSR (corporate social responsibility)

LAINNYA

- Updating Kondisi dan Realisasi Penanganan RTLH tiap kab/kota
- Updating data geospasial



BASIS DATA PSR PADA UMUMNYA !!!



Format 1A Basis Data PKP untuk Provinsi

- Struktur Organisasi Dinas PKP Provinsi
- Alokasi APBD Provinsi untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
- Jumlah Fisik Bangunan Rumah
- Backlog Perumahan (Penghunan dan Kepemilikan)
- Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- RTLH dalam Kawasan Kumuh

Format 1B Basis Data PKP untuk Kab/Kota

- Struktur Organisasi Dinas PKP Kab/Kota
- Alokasi APBD Kab/Kota untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
- Jumlah Fisik Bangunan Rumah
- Backlog Perumahan (Penghunan dan Kepemilikan)
- Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- RTLH dalam Kawasan Kumuh

Form Suplai Rumah

- Laporan bulanan data IMB untuk Kab/Kota
- Laporan bulanan data pembangunan unit baru
- Laporan bulanan data pengajuan KPR
- Laporan Bulanan Pembangunan Rumah melalui CSR/Tayasan/Entitas/Lembaga Pengelola Keuangan Publik

Ketiga form basis data tersebut akan diinput ke dalam aplikasi e-profil dan nantinya sementara ini di baharu ke SIBARU



Data merupakan dasar yang penting dalam perencanaan dan pembuatan keputusan/ kebijakan pada proses pembangunan salah satunya dalam penyelenggaraan perumahan secara tepat guna



Kab/Kota	: Kota
Nama Dinas	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Alamat	:
Kontak Person	: A. (0812****)

Form 1A/1B

DAFTAR ISIAN PENDATAAN PERUMAHAN PROVINSI 2023

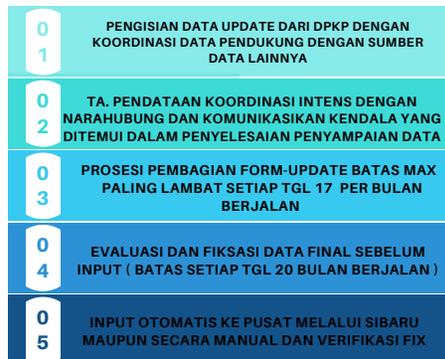
Kegiatan pendataan Perumahan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi Perumahan. Data ini merupakan bagian dari Pembangunan Basis Data Perumahan Provinsi sesuai UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pasal 17 dan Peraturan Pemerintah No.88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 16 ayat 1.

Tabel ini diisi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kab/Kota, untuk kelengkapan datanya berkoordinasi dengan Pokja PKP Kab/Kota, BPS Kab/Kota, Bappeda kab/Kota, Dinas Sosial Kab/Kota, BKKBN kab/Kota, atau pendataan yang dilakukan Kab/Kota secara mandiri. Untuk pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi Koordinator Bidang Tugas Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Informasi, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan : dstinperumahan@cu.go.id

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Bobot Perolehan Basis Data Perumahan

Kategori	Detail	Bobot
A	: Data Kelembagaan PKP	Bobot 10%
B	: Data Status Pokja /Forum Perumahan	Bobot 10%
C	: Data Status RP3KP	Bobot 10%
D	: Data Demand/Kebutuhan Perumahan tahun 2022	Bobot 20%
E	: Data Supply/Data Pembangunan Perumahan tahun 2022	Bobot 20%
F	: Data Target Perumahan tahun 2023-2025	Bobot 20%
Verifikasi	: Formulir Persetujuan Isian Pendataan PKP	Bobot 10%

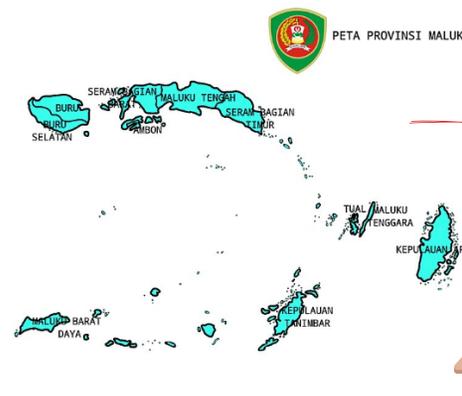
MEKANISME PENYAMPAIAN/PENGISIAN FORM



UPDATE PER BULAN TANPA PENGECUALIAN



SEKILAS GAMBARAN PROFIL WILAYAH PENDATAAN PSR PROV MALUKU



Kabupaten/Kota	Ibu Kota Kabupaten/Kota	Luas Total Area
Kepulauan Tanimbar	Saumlaki	4.465,79
Maluku Tenggara	Lagangur	1.031,81
Maluku Tengah	Masohi	7.953,81
Buru	Namlea	4.932,32
Kepulauan Aru	Dobo	8.152,42
Seram Bagian Barat	Piru	5.033,38
Seram Bagian Timur	Bula	6.429,88
Maluku Barat Daya	Tiakur	4.581,06
Buru Selatan	Namrole	3.780,56
Ambon	Ambon	298,61
Tual	Tual	254,39
Provinsi Maluku		46.914,03

Pendataan PSR di Provinsi Maluku akan melingkup 2 Kota dan 9 Kab





RENCANA PENANGANAN DI TIAP KAB/KOTA



NO.	Kab/Kota	Kegiatan	Jumlah Unit	Sumber Pembiayaan	Lokasi
1	PKP Prov Maluku	BEDAH RUMAH/RUBIHA	40	APBD	Belum Tahu Lokasi Tersebar di Kota Amboi, Kab.Maluku Tengah, Kab.Tanimbar, Kab.Buru, Kab.Aru dan Kab.Seram Bagian Timur
		PEMBANGUNAN BARU (PB) BAGI MASYARAKAT MBR (2023)	55		
2	Kepulauan Tanimbar	-	-	-	-
3	Maluku Tenggara	Rubih PB	30	FK Duk Integrasi	Kec.Kil Kocil (Kuluraha Obiqiq dan W'ndak)
		BEDAH RUMAH/RUBIHA	144	APBD	
		ESPS KATEGORI PENINGKATAN KUALITAS	129	APBD Provinsi	
		APBN (Provinsi/SN YTI/BI)	105	APBN	
4	Maluku Tengah	Bencana Alam, Non Alam dan Sosial	44	DAU	Tersebar
		BEDAH RUMAH/RUBIHA	83	APBD KABUPATEN	
5	Buru	REHAB RUMAH BENCANA	32	APBD	Kec.Pala Harau
6	Kepulauan Aru	REHAB RUMAH BENCANA	17	APBD	W'rubal
7	Seram Bagian Barat	BBR/BAHAN BANGUNAN RUMAH (Polek Pikiran Desa)	350	DAU POKIR	(Kec. Neamol Bekkong Desa Biso dan Desa Limboro), (Kec. Inomoni, Kec.Seram Barat, Kec.Tanival Timur), Kec.Kairatu dan Kec.Neamol

NO.	Kab/Kota	Kegiatan	Jumlah Unit	Sumber Pembiayaan	Lokasi
8	Seram Bagian Timur	BEDAH RUMAH/RUBIHA PK	70	APBD	(Kec.Gorom Timur - Desa Kota Sri (10) - Desa Adm Tania (9)) , (Kec.Pala Gorom-Desa Amambava (50) - Desa Adm Loko (1))
		BBR/ Bahan Bangunan Rumah (2021-2023)	60	APBD	Kec.Bali 15, Kec.Konop Wabab 9, Kec.Pala Gorom 9, Kec. Mian Daru 6, Kecamatan Sibita Widi Timur 6, Kec. Vevansa 15
3	Maluku Barat Daya	BEDAH RUMAH/RUBIHA PK	40	APBD	(Kec.Moa Laker - Desa Tomorani (10) -Desa Kiera (20)) , (Kec.Pala Letti -Desa Tomra (10))
10	Buru Selatan	Rabablitasi Rumah Tua, Rumah Adat dan Rumah Raja - PK	7	DAU	(Kec.Wasena-Desa W'ndak, Desa Lora dan Desa Sini), (Kec.Ambaha Desa Saha), (Kec.Kepala Madan, Desa Fog), (Kec.Nawale Desa Elhah), (Kec.Fas Fata -Desa Siwotlaha)
		Rabablitasi RTLH di Desa Desa - PK	11	Desa Desa	10 (Kec. Lokulu,Kil Neat) dan 1 (Kec.Fas Fata, Desa Wado)
11	Amboi	Rabablitasi RT/Rumah Sakti/terak Terpda (Konekco)- PK	84	APBN	Kec. Wasana (lokasi desa tersebar dan sementara menunggu sosialisasi Pusat)
		BEDAH RUMAH/RUBIHA REHAB RUMAH BENCANA	8	APBD	Belum Tahu Lokasi
12	Tual	BEDAH RUMAH/RUBIHA REHAB RUMAH BENCANA	13	APBD	Desa Fidita, Kec.Daluk Utara
		BEDAH RUMAH/RUBIHA REHAB RUMAH BENCANA Sosial	37	APBD	KILLoda,Kec.Yador

JENIS FORM	NO	KAB/KOTA	FORM A			FORM B	FORM C	FORM D	FORM E	FORM F	KET
			Data Kalambege a PKP	Anggara n Kegiatan Disar PKP	Rincian Kegiatan n Disar PKP	Data Statur Pakja/Paru m Parumahan	Data Statur RP3KP	Data Demand/K abutaha Parumahan Tahun 2023	Data Supply/Pam bangunan Parumahan Tahun 2023	Data Target Demand Parumahan 2023-2026	
1A	1	PKP Prov Maluku	✓	✓	✓	600-124 Tahun 2022	Belum Dianggarkan	✓ (kurang data PLN)	Belum lengkap	✓ (Kurang lengkap padoriniran RTLH)	Melonkopi irian farm dan up date turur
	2	Kepulauan Tanimbar	✓	-	-	903 Tahun 2021	Reviu	✓ (kurang data PLN)	Belum lengkap	✓ (Kurang lengkap padoriniran RTLH)	Melonkopi irian farm dan up date turur
	3	Maluku Tenggara	✓	✓	✓	604-05-257 Tahun 2020	Reviu	✓ (kurang data PLN)	✓	✓	Melonkopi irian farm dan up date turur
	4	Maluku Tengah	✓	✓	✓	65076 Tahun 2021	Rabablitasi/Kea ulkari publik pralo-gda	✓ (kurang data PLN)	✓	✓	Melonkopi irian farm dan up date turur
	5	Buru	✓	-	-	621.27261 Tahun 2022	Belum Dianggarkan	✓ (kurang data PLN)	✓	✓	Melonkopi irian farm dan up date turur
1B	6	Kepulauan Aru	✓	✓ (perqoran)	✓ (perqoran)	652-232 Tahun 2020	Reviu	✓	✓	✓ (Kurang lengkap padoriniran RTLH)	Melonkopi irian farm dan up date turur
	7	Seram Bagian Barat	✓	-	-	193 Tahun 2020	Reviu	✓ (kurang data PLN)	✓	✓	Melonkopi irian farm dan up date turur
	8	Seram Bagian Timur	✓	✓ (tidak lengkap)	✓ (tidak lengkap)	050-13-592 Tahun 2020	Monqogor kon menyurur	✓	Belum lengkap	✓ (Kurang lengkap padoriniran RTLH)	Melonkopi irian farm dan up date turur
	9	Maluku Barat Daya	✓	✓	✓	050/1288 Tahun 2021	Monqogor kon menyurur	✓ (kurang data PLN)	Belum lengkap	✓ (Kurang lengkap padoriniran RTLH)	Melonkopi irian farm dan up date turur
	10	Buru Selatan	✓	✓ (perqoran)	✓ (perqoran)	225 Tahun 2021	Kanuklari publik pralo-gda	✓	Belum lengkap	✓ (Kurang lengkap padoriniran RTLH)	Melonkopi irian farm dan up date turur
	11	Amboi	✓	✓	✓	87a. Tahun 2021	Monqogor kon menyurur	✓ (kurang data PLN)	✓	✓ (Kurang lengkap padoriniran RTLH hunian layak)	Melonkopi irian farm dan up date turur
	12	Tual	✓	✓	✓	467 Tahun 2020	Reviu	✓	✓	✓	Melonkopi irian farm dan up date turur

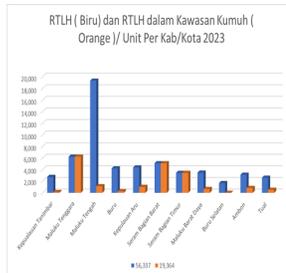
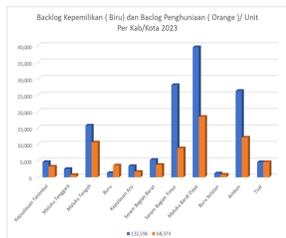
PROGRESS PENDATAAN PSR PROV MALUKU



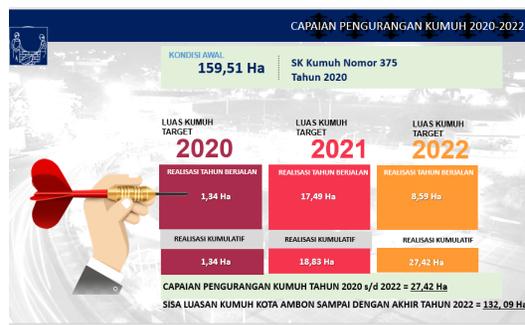
PROGRESS PENDATAAN PSR PROV MALUKU

DATA BACKLOG DAN RTLH

NO.	Kab/Kota	Backlog Kepemilikan (Unit)	Backlog RTLH (Unit)	Jumlah RTLH (Unit)	Jumlah RTLH Dalam Kawasan Kumuh (Unit)	Keterangan
1	Kepulauan Tanimbar	4.656	3.262	2.742	144	
2	Maluku Tenggara	2.540	719	6.236	6.236	
3	Maluku Tengah	15.722	10.611	19.355	1.138	
4	Buru	1.317	3.613	4.212	279	
5	Kepulauan Aru	3.427	1.664	4.379	1.021	
6	Seram Bagian Barat	5.289	3.789	5.099	5.099	
7	Seram Bagian Timur	28.042	8.830	3.441	3.441	
8	Maluku Barat Daya	39.557	18.404	3.481	655	Perlu dilengkapi
9	Buru Selatan	1.168	796	1.678		
10	Amboi	26.276	12.084	3.118	838	
11	Tual	4.602	4.602	2.596	519	
Total Keseluruhan		132.596	68.374	56.337	19.344	



Data Backlog di Kota Amboi Cukup Tinggi. Hal tersebut perlu keseriusan pemda dan seluruh stakeholder dalam upaya menggiatkan program pembangunan perumahan



Sumber Data : Collect Data BPPW

KONDISI KEKUMAHAN DI KOTA AMBOI

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)		
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketersediaan bangunan	1.696	Unit	32,29%
	b. Kesiapan Bangunan	-	Ha	0,00%
Batas kota Kumuh Bangunan Gedung		1.250	Unit	23,80%

Sesuai dengan Baseline dan SK Kumuh Tahun 2020, terdapat 1.250 RTLH yang tersebar di 17 Kawasan Kumuh di Kota Amboi



KONDISI DATA DEMAND

Data Backlog di Kota Ambon Cukup Tinggi, hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat demand/kebutuhan rumah juga cukup tinggi di Kota Ambon

Demand/Kebutuhan Supply/Pasokan/ Pembangunan



Kondisi Data Supply Kota Ambon masih sangat sedikit dan tidak seimbang dengan dengan kondisi demand



PERBAIKAN RTLH DI KOTA AMBON

PERBAIKAN RTLH Di Kota Ambon Masih Nampak Stagnan Dari PEMDA dll dan Sampai Saat Ini masih didominasi dari PUPR melalui Program BSPPS



NO.	Kab/Kota	Backlog Kepemilikan (Unit)	Backlog Penghuniannya (Unit)	Jumlah RTLH (Unit)	Jumlah RTLH Dalam Kawasan Kumuh (Unit)	Keterangan
1	Kepulauan Tanimbar	4,656	3,262	2,742	144	
2	Maluku Tenggara	2,540	719	6,236	6,236	
3	Maluku Tengah	15,722	10,611	19,355	1,138	
4	Buru	1,317	3,613	4,212	273	
5	Kepulauan Aru	3,427	1,664	4,379	1,021	
6	Seram Bagian Barat	5,289	3,789	5,099	5,099	
7	Seram Bagian Timur	28,042	8,830	3,441	3,441	
8	Maluku Barat Daya	39,557	18,404	3,481	655	Perlu dilengkapi
9	Buru Selatan	1,168	796	1,678	-	
10	Ambon	26,276	12,084	3,118	838	
11	Tual	4,602	4,602	2,596	519	
Total Keseluruhan		132,596	68,374	56,337	19,364	

KONDISI PROGRESS PERLU DITINGKATKAN LAGI UNTUK 7 BULAN TERSEBUT TAHUN 2023 (PERLU KOMITMEN BERSAMA)

KONDISI DATA SUPPLY

KAB/KOTA	MBR		Non MBR		MBR		Non MBR		MBR		Non MBR		MBR
	BSPPS (PUPR)	PEMDA	YAYASAN/LEMBAGA/ICSR	Non MBR	PENGEMBANG	Non MBR	PERBANKAN	Non MBR	PTSP (IMB/PBG)	Non MBR	MASYARAKAT (NON PBG)	DANA DESA	
Ambon	61	-	-	-	8	36	10	12	7	22	-	-	1

TOTAL SUPPLY : 157 UNIT

Nama Perumahan	Jenis Klasifikasi	Peruntukan	Program	Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah Pembangunan 2023 (Unit)	Realisasi Pembangunan 100% (Unit)	Tapak/Sesuai	Keterangan
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	PENINGKATAN KUALITAS (PK)	MBR	NAHP PKE (APBN Kementerian PUPR)	MALUKU	AMBON	SIRIMAU		64	61	TAPAK	TAPP - Pasympaian BSPPS Buhai P2P Saker Penyedia Perumahan Provinsi Maluku
							PANDAN	11	11		
							HATIVE KECIL	1	1		
							BATU MERAH	24	23		
							BAGUALA	12	10		
							PASSO	12	10		
TELUK AMBON	HUNUTH	16	16								

HAMBATAN/KENDALA PELAKSANAAN PSR KOTA AMBON



Belum optimalnya pemberdayaan pokja dan forum pkp dalam membantu mengkoordinasikan percepatan penyampaian pendataan

Tertambatnya DPA dan alokasi dana dari APBD yang belum dirilis maupun alokasi dana yang minim

Ketergantungan Sejumlah kegiatan penyelenggaraan perumahan bertumpu pada anggaran APBD, namun realisasi APBD belum dirilis dan fix/adanya pengeseran

Belum optimalnya pemenuhan Data PSR terutama data jumlah yang dibangun oleh masyarakat yang belum memiliki NON-IMB/PBG

Keterbatasan anggaran daerah dan juga tim faskel untuk update terkait dengan detail naik turunnya RTLH/Backlog

Tingkat kesadaran para stakeholder perumahan yang belum merata akan peran dan fungsi data yang sangat penting & strategis

Tidak kooperatifnya sejumlah pengembang rumah subsidi dan rumah komersial dalam turut peran penyampaian data

PBG belum terbit /bermasalah sehingga pengembang sulit menjalin kolaborasi maupun beberapa kelengkapan data yang belum lengkap

Kurang aktifnya pengembang, sejumlah perbankan (mandiri) dan pemda dalam memberikan data pembangunan rumah



Pendampingan dan optimalisasi pengaktifan peran pokja dan forum pkp

Komitmen bersama stakeholder perumahan DPKP, Perbankan dan dinas perzinan dll agar terpadu 1 pintu (satu data) rutin mengirimkan data bulanan/updating data Untuk DPKP (Max Tgl 17), Perbankan/Perizinan (Max Tgl 19-20), Pengembang (Max Tgl 17)



STRATEGI PELAKSANAAN PSR DI KOTA AMBON

Pokja PKP dapat bekerja sama dengan pemerintah desa untuk berdayakan mahasiswa KKN di Kota Ambon dalam membantu pendataan masyarakat MBR/NON MBR yang NON PBG/IMB maupun kondisi sosbudekno masyarakat RTLH khususnya MBR dalam mencapai target PSR

Pengembang dapat terus giat melakukan pembangunan untuk Non MBR, namun juga giatkan rumah subsidi bagi MBR

Pemberian kemudahan perizinan dan kepastian status legalitas lahan dalam alokasi perumahan dalam mendukung kolaborasi pihak pengembang

Jejak kolaborasi dan sinergitas program perbantuan perumahan dan kembangkan skema pembiayaan perumahan lagi lebih variatif dalam menggandeng peran CSR, Baznas dan lembaga keagamaan, pihak TNI/Polri dll

Pokja PKP dapat melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah desa di wilayah kota ambon untuk memaksimalkan alokasi dana desa dalam penyelenggaraan perumahan dengan (1 desa dalam per tahun dapat membantu/menangani 6-8 unit rumah. Serta jaring kolaborasi basis data MBR di tingkat desa

Peroepatan rilis APBD dan PEMDA tetapkan alokasi khusus pendanaan dari APBD dapat diperbesar untuk anggaran penyelenggaraan perumahan di daerah

Memaksimalkan Waktu Tersisa di Tahun 2023 untuk segera meningkatkan progress realisasi pembangunan di tiap program dalam pencapaian target prognosis program sejuta rumah



STRATEGI PELAKSANAAN PSR DI KOTA AMBON

Kemudahan percepatan penertiban PBG/IMB

Sinkronisasi Data Program PKP dan Kekumuhan dengan BPPW

Gandeng Kerjasama dengan Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat provinsi maupun kab/kota pada beberapa fraksi/partai yang ada untuk tiap fraksi membantu 5 unit rumah

Optimalkan koordinasi secara intens antara pemangku kepentingan melalui turing dan daring serta dari kegiatan forum/rakor lintas sektor

Komitmen bersama dalam penguatan sinergitas penyelenggaraan penyediaan perumahan bukan hanya pusat tapi kesadaran Pemda dalam ikut andil.

Perbankan juga dapat turut membantu dalam pemberian bantuan bahan material/ finansial untuk rehab rumah

PT.PLN dapat turut membantu memberikan informasi data terkait jumlah sambungan listrik PLN untuk sektor perumahan di tiap kab/kota. Serta dibutuhkan sumbangsh dana bantuan CSR dari PT.PLN

TIM Serbu TFL dari dinas PKP dapat membantu mendata pembangunan yang dilakukan masyarakat MBR/NON MBR yang NON PBG/IMB

Pemda dan Pokja PKP dapat membantu mengupdate informasi detail tentang CSR/LSM/Lembaga Terkait/Kementerian lainnya yang turut membantu penyelenggaraan perumahan

Berdayakan portal khusus dari DPKP Provisi Maluku yang sudah dilaunching (Baileo Maluku dalam mempermudah backup penyampaian supply dan demand secara rutin maupun secara ril time

Pihak perbankan dapat memberikan kemudahan dalam calon pengajuan KPR

POTRET PERTUMBUHAN AKSES RLH PADA LEVEL PROVINSI

Provinsi dengan RLH di bawah rata-rata nasional				
Provinsi	2019	2020	2021	2022
Kep. Bangka Belitung	26.16%	30,64%	27,60%	30,79%
Papua	26.19%	28,56%	28,92%	27,28%
DKI Jakarta	34.25%	33,18%	40,00%	36,23%
Nusa Tenggara Timur	32.08%	36,34%	40,41%	41,80%
Kepulauan Riau	44.09%	48,19%	50,23%	46,69%
Bengkulu	41.73%	47,94%	51,36%	54,98%
Jawa Barat	49.29%	52,28%	53,14%	53,37%
Kalimantan Tengah	48.88%	51,97%	55,34%	54,07%
Sumatra Barat	51.42%	56,87%	56,67%	58,18%
Sulawesi Barat	47.23%	50,65%	57,26%	55,37%
Kalimantan Selatan	46.73%	52,99%	57,50%	55,96%
Sumatra Selatan	52.23%	55,25%	57,86%	59,96%
Papua Barat	52.21%	55,44%	57,90%	53,81%
Maluku	51.75%	57,50%	60,69%	60,66%
Banten	56.92%	56,21%	60,78%	60,98%
Kalimantan Barat	53.51%	58,81%	61,17%	60,74%
Lampung	51.99%	53,22%	61,56%	61,24%
Jambi	54.78%	61,41%	62,54%	60,85%
Sulawesi Tengah	56.64%	58,85%	62,70%	58,61%
Nusa Tenggara Barat	56.35%	62,53%	62,90%	62,30%
NASIONAL	56,51%	59,54%	60,90%	60,66%

10 Provinsi dengan Rata-rata Naiknaikan RLH Tertinggi					
Provinsi	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata
Bengkulu	41.73%	47,94%	51,36%	54,98%	3,31%
Sulawesi Tenggara	59.82%	66,77%	70,45%	72,80%	3,25%
Nusa Tenggara Timur	32.08%	36,34%	40,41%	41,80%	2,43%
Lampung	51.99%	53,22%	61,56%	61,24%	2,31%
Kalimantan Selatan	46.73%	52,99%	57,50%	55,96%	2,31%
Sulawesi Selatan	60.92%	64,24%	69,11%	69,90%	2,24%
Maluku	51.75%	57,50%	60,69%	60,66%	2,23%
Sulawesi Barat	47.23%	50,65%	57,26%	55,37%	2,04%
Sumatra Selatan	52.23%	55,25%	57,86%	59,96%	1,93%
Kalimantan Timur	65.55%	70,80%	70,70%	73,18%	1,91%

10 Provinsi dengan Rata-rata Naiknaikan RLH Terendah					
Provinsi	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata
Banten	56.92%	56,21%	60,78%	60,98%	1,01%
D.I. Yogyakarta	81.61%	86,19%	85,15%	84,94%	0,83%
Sumatra Utara	64.65%	67,44%	69,48%	67,26%	0,65%
Kepulauan Riau	44.09%	48,19%	50,23%	46,69%	0,65%
Jawa Tengah	64.69%	67,93%	66,47%	67,02%	0,58%
DKI Jakarta	34.25%	33,18%	40,00%	36,23%	0,50%
Sulawesi Tengah	56.64%	58,85%	62,70%	58,61%	0,49%
Papua Barat	52.21%	55,44%	57,90%	53,81%	0,40%
Papua	26.19%	28,56%	28,92%	27,28%	0,27%
Jawa Timur	65.61%	68,08%	66,93%	66,28%	0,17%

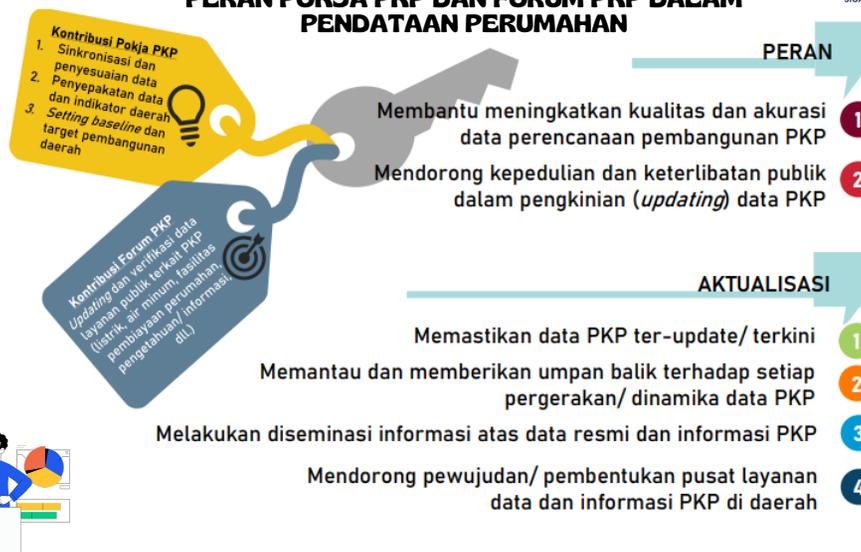
Sumber: Data RTLH, Olahan Bappenas terhadap Susenas 2019-2021

Key Takeaway

- Hanya 6 provinsi yang berhasil "keluar" dari zona merah (akses RLH di bawah rata-rata nasional)
- Meskipun masih berada di zona merah, Provinsi Bengkulu memiliki kenaikan rata-rata akses RLH tertinggi
- Terdapat 4 provinsi yang perlu menjadi perhatian karena kenaikan rata-rata akses RLH terendah, padahal provinsi tersebut berada di zona merah



PERAN POKJA PKP DAN FORUM PKP DALAM PENDATAAN PERUMAHAN



IMPORTANT

Pendayagunaan dari hasil launcing aplikasi Baileo Maluku (integrasi penyamaan hal variable atau indicator) data perumahan yang telah mulai diprakasari oleh PKP Prov Maluku,)

Keseriusan Dukungan DPKP dan semua stakholder/OPD dalam mendukung pendataan perumahan guna pengembangan satu data untuk penyelenggaraan perumahan

IMPORTANT

Seluruh Stakholder (DPKP, PTSP, Pengembang dll dapat rutin penyampaian data rutin terupdate tiap bulannya

Mengalokasikan dan Kolaborasi Dana Perumahan Bagi MBR dalam skema pembiayaan yang variatif (Baznas, Keagamaan, CSR, Dana Desa dll)

Turut Update data terbaru dan juga dapat menyampaikan kendala/hambatan agar dicari solusi penyelesaian bersama

Perlu Komitmen OPD Untuk Pengembangan Satu Data



Penyediaan data perumahan yang faktual, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan.



KOMITMEN APA LAGI YANG PERLU DI SUSUN



**GIAT KESEPAKATAN
KOMITMEN**



DOKUMENTASI KOORDINASI PENDATAAN PSR Prov Maluku

DANKE !



